

MENJADIKAN POLANTAS INSTRUMEN YANG MAMPU MEREFORMASI KULTUR POLRI



Sambutan Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri.

RAKERNIS FUNGSI LALU LINTAS

RAKERNIS Fungsi Lalu Lintas se-Indonesia, yang dilaksanakan di Jakarta, 8 sampai 10 Maret lalu, memiliki makna mendalam bagi Polri, khususnya jajaran Ditlantas Babinkam Polri.

Pertama, dalam Rakernis bertema membangun Profesionalisme Polantas Melalui Kemitraan Dengan Para Pemangku Kepentingan di Bidang Lalu Lintas Guna Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat tersebut terjadi satu momen penting, karena saat itu terlahir satu nota kesepahaman (memorandum of

understanding (MoU) antara Polri dan Depdiknas, yang masing masing diwakili Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Ir Muhammad Nuh. Kesepahaman tersebut menggembirakan karena masalah lalu lintas masuk dalam kurikulum pendidikan.

Kedua, terlahir satu komitmen bersama para Dirlantas, para Kasubdit, para Kasat PJR, para Kasubbag Lantas, dan para Kasat Lantas seluruh Indonesia. Mereka sepakat melakukan inonasi-inovasi baru pemberdayaan potensi dan peran serta semua pihak, mencegah

penyimpangan dan mewujudkan pelayanan prima.

Rakernis bertujuan menyamakan satu persepsi dalam pelaksanaan tugas fungsi teknis lalu lintas dalam mengimplementasikan program-program Quick Wins, disamping untuk menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2010. Hadir sebagai pembicara antara lain Kapolri, Mendiknas, Irwasum Polri, Kababinkam Polri, Kadiv Propam Polri, Kemdagi, Kementerian Luar Negeri, kementerian PU, kementerian Perhubungan, para pejabat Ditlantas Babinkam Polri dan sejumlah pakar.

Sementara sasaran yang akan diraih Rakernis tersebut adalah selain untuk menyamakan persepsi juga terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polri Ditlantas Babinkam Polri dan jajarannya tahun 2010, yakni pelayanan Polantas sampai dengan lini terdepan guna mewujudkan Kamseltibcarlantas.

Kababinkam Polri Komjen Drs Iman Haryatna dalam laporan singkatnya menjelaskan bahwa institusi Polri mengemban fungsi lalu lintas dituntut berfungsi sebagai instrumen struktural yang mampu mereformasi kultur Polri di bidang penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas.

Hal itu, kata Iman Haryatna, seiring implikasi security sector reform di Indonesia, khususnya yang terkait sektor keamanan. "Seiring dengan hal itu pula, Polantas bertekad menjadi salah satu roda penggerak perubahan yang sedang dilakukan Polri baik aspek struktural, instrumental, maupun kultural. Sebagai implikasi keinginan untuk

mewujudkan good governance yang tercermin dalam cita-cirita reformasi birokrasi pemerintahan yang mengutamakan hubungan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan stake holder dan masyarakat maka diberlakukan UU No: 22/2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan," papar Iman Haryatna.

Polri yang mempunyai peran sentral untuk memperkokoh harmonisasi, integralisasi dan sinkronisasi unsur-unsur pemerintahan yang bertugas pokok di bidang lalu lintas. Selain itu, tandas Iman Haryatna, diberlakukannya UU No. 22/2009 menstimulir dinamika hubungan pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk bersinergi dalam posisi sejajar, selaras dan saling mengontrol. "karena itu, tema rakernis ditetapkan seperti itu," kata Iman Haryatna, yang menyebut out put yang diharapkan adalah kebulatan pernyataan komitmen tentang bagaimana fungsi lalu lintas Polri menjalankan aktivitas mulai dari tingkat pusat hingga tingkat satuan operasional di masyarakat.

PESAN PERUBAHAN

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memberikan arahan antara lain menyorot soal aspek utama penyebab kecelakaan dan bahwa masalah lalu lintas tak hanya dapat dilakukan oleh polisi sendiri tapi harus melibatkan instansi lain. Soal kecelakaan lalu lintas, kata Kapolri, penyebabnya adalah faktor kombinasi beberapa unsur yang mengubah beberapa kumpulan hazard menjadi kecelakaan lalu lintas (accident).

Menurut Kapolri dengan mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan maka unsur kesalahan manusia menjadi titik tolak upaya keselamatan lalulintas. "Namun kondisi jalan yang kurang baik dan kendaraan yang tak laik jalan menyebabkan secara definisi tidak semua kecelakaan disebabkan unsur manusia," kata Kapolri.

Secara umum disepakati faktor manusia penyebab utama. Mengutip laporan Badan Administrasi Penerbangan Amerika Serikat, Kapolri mengatakan 60-70% kecelakaan pesawat terbang AS karena kesalahan



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta Rakernas.

pilot. Demikian pula kecelakaan kereta api. "Pada kesempatan ini saya sampaikan untuk mewujudkan apa yang diamanahkan oleh UU No.22/2009 tidak mudah," katanya.

Kendati, urai Kapolri, rangkaian kebijakan tentang reformasi sudah dilakukan dengan tiga aspek. Pertama., aspek instrumen, yakni setelah Polri pisah dari TNI, Polri memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dengan anggaran cukup tinggi Rp27 triliun serta PNPB Rp. 2 triliun. 'tantangan lalu lintas cukup mengemuka karena itu perlu digalang instansi terkait. Kemudian, kedua, aspek Struktur Direktorat Lalu Lintas dikembangkan menjadi bintang dua sehingga perlu diawaki dengan SDM yang profesional, hal ini agar koordinasi dengan stake holder lebih baik lagi.

Dan, ketiga, Kapolri mengakui kultur masih lemah, dimana dalam hal rekrutmen masih adanya pungutan, pendidikan pembentukan hanya empat bulan sehingga Polri masih memiliki kultur yang kurang baik. "Untuk itu, Lalu lintas harus dapat mengubah budaya yang saat ini ada image yang kurang enak, sehingga jangan sampai ada anggota yang menodai organisasi Polri," pesan

Kapolri.

Pada bagian lain arahnya, Kapolri mengingatkan bahwa bukan hanya tanggungjawab Polri tapi instansi lain sehingga sinergitas dapat terjalin dengan baik. Untuk itu Kapolri berpesan agar Polantas melakukan evaluasi program secara konsisten, jangan ada penyimpangan dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang SSB. "Saya berharap para Dirlantas dapat duduk bersama dengan komisi instansi lain sehingga beban tugas yang diamanatkan UU. NO.22/2009 dapat terlaksana dengan baik.

Pada bagian lain arahnya, Kapolri menekankan agar sistem yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh fungsi lalu lintas dapat merubah kearah yang lebih baik. "Sejalan dengan RJPM lima tahun dalam rangka membangun kemitraan agar saling bersinergis sehingga output dapat meningkatkan lkuualitas pelayanan yang lebih baik." Apakah para pejabat tinggi tinggi fungsi Lantas bersedia melakukan perubahan sistem dan mekanisme pelayanan SSB dan menghilangkan penyimpangan? Sehingga terwujud zero permasalahan?" pesan Kapolri.

Sementara, Irwasum Polri Komjen

Pol Drs Nanan Sukarna dalam arahnya lebih menekan pada soal pengawasan. Katanya, pengawasan oleh inspektorat tak perlu dilakukan bila kita sudah jujur dan menjadi polisi yang transparan, akuntabel dan demokratis.

Menurut Nanan Sukarna, dalam membangun patnershift building ada tiga gugus harkamtibmas yakni diperlakukan kondisi awal, meminimize polisi sebagai penindak, dan melipatgandakan sebagai pengayom, pelindung.

POLISI INISIATOR

Rakernis pada hari pertama ini mempunyai nilai tambah karena hari itu hadir pula Dr Made Wandu, Msc.Sc, dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri. Made wandu yang menyampaikan makalah 'Peran Samsat Dalam Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah' banyak mendapat pertanyaan antusias dari peserta Rakernis.

Saat itu, Made mengupas UU No.22/2009 pasal 67 tentang Samsat. Katanya, sampai saat ini Kepres belum dibuat, antara Polori, depdagri dan Dephub harus bekerja sama dan yang terjadi cost cutting issue yaitu satu permasalahan dengan tiga stakeholder yang harus duduk bersama. "Untuk itu harus jelas siapa harus berbuat apa. Hal ini sangat riskan terjadi konflik karena ada tiga kepentingan bila suatu urusan tiga stakeholder dan tidak membuat aturan main makan akan berbahaya," katanya. Aturan pemerintah adalah aturan dari lahir sampai mati menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diatur dengan jelas.

Sedangkan otonomi di Indonesia adalah otonomi terluas di dunia sehingga perlu dibuat aturan yang jelas sehingga tak menimbulkan konflik atau perpecahan yang menimbulkan kehancuran.

Karena itu, kata Made, kepolisian harus membuat draft untuk memulai membuat aturan. "Bapak-bapak adalah lokomotif sehingga seyogyanya Ditlantas Polri bergabung dengan



Penyajian materi Kementerian Dalam Negeri oleh Dirjrn Pemerintahan Otonomi Daerah Dr. Made Wandu M.Sc

Biro Hukum untuk memulai dengan mengundang stakeholder, nanti duduk bersama untuk membuat aturan sesuai domain masing-masing," imbuh Made Wandi. Dalam Kepres yang menyangkut Samsat harus jelas peran dan fungsi masing-masing dan siapa berbuat apa.

Paparan Made Wandi tersebut memunculkan pertanyaan. Pertama dari Kasat Lantas Papua, AKP Salino. Perwira pertama Polri ini mempertanyakan mengenai penetapan pajak BBN 2. Pertanyaannya, terkadang masyarakat tidak terlayani dengan baik oleh Dispenda kabupaten tak berwenang. Oleh karena itu, apakah mungkin apabila PP sudah dibuat, diberi kewenangan kabupaten untuk menetapkan pajak?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Made Wandi menyatakan bahwa ada empat daerah otonomi di Indonesia, otonomi khusus *lex specialis lex derogad* yaitu Papua, Aceh, DIY dan Metro Jaya. Jawabannya, provinsi yang menetapkan dan yang kedua provinsi bisa menugaskan kabupaten/kota untuk menetapkan pajak atas nama provinsi. Permasalahannya, provinsi tidak mau memberikan



Pemberian Cinderamata kepada Ir. Taufik Widjono, M.Sc dari Kementerian Pekerjaan Umum.

ke kabupaten/kota bahkan malah membuat kantor cabang di kabupaten. kota.

"Ketika Perda Khusus Papua yang mengatur maka kewenangan itu ada pada provinsi. Provinsi menetapkan tarif, maka langkah yang bisa diambil provinsi bisa menugaskan menetapkan atrif atau bupati/walikota

bisa membantu menentukan tarif atau membuat kantor di kabupaten," tegas Made Wandi.

Pertanyaan kedua datang dari Kombes Pol Drs Giri Purwanto, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi. Giri menanyakan urusan samsat dalam penetapan tarif pajak, dalam pembuatan draft Perda? Dan Program



Demo penggunaan SIM Smart oleh Tim dari Bank Rakyat Indonesia



Paparan Dirlantas Babinkam Polri Brigjen Pol. Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si

keselamatan menyangkut jalan. Made menjawab bahwa bila menyangkut jalan siapa yang membuat aturan. Bila menyangkut satu sektor tak perlu dari berbagai stakeholder, tapi, bila menyangkut berbagai sektor masing-masing stakeholder harus duduk bersama membuat draft bersama. Siapa yang inisiator Kepolisian. Tapi, bila dalam pembuatan aturan main menyangkut substansi maka kementerian dalam negeri harus diundang.

Selain Dirjen Otonomi daerah, hadir pula Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Ir Taufik Widjoyono. Dia menyampaikan Peran Kementerian PU dalam penyelenggaraan UU No.22/2009. Wadirlantas Kombes Pol Didik Purnomo pun memberikan paparan tentang Peran Quick Wins 2009 dan Program Kerja 100 hari Polri Bidang Lalu Lintas. Wadir menyampaikan untuk kendala yang ditemukan di lapangan agar disampaikan kepada Dirlantas. Dalam program 100 hari, ada Polda yang meneliti hingga detil, dan ada juga yang tidak peduli.

"Untuk tahun 2010 akan ada penilaian Polda secara transparan," tegasnya. Kalau ada program dari Polda yang bisa diangkat jadi program nasional agar dimasukkan dalam program termasuk kajian. Kasubdit Bin Gakum Kombes Bambang

Sukamto juga memberikan paparan berjudul 'Pendataan Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas'.

Rakernis Hari kedua, Selasa (9/3) menghadirkan pembicara dari Kementerian Perhubungan yang mengambil tema 'Peran kementerian Perhubungan Dalam Penyelenggaraan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Menurutnya, peran kementerian Perhubungan tergantung dari materi rumusan PP dan akan dijabarkan dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertanyaan bermunculan dalam paparan dari Kementerian Perhubungan. Di antaranya datang dari Kasubag Lantas Polwil Kedu Kopol Doodi Darjanto, soal laka yang terjadi akibat kelebihan muatan.

Diakui oleh Kementerian Perhubungan bahwa masalah kelebihan muatan sudah menjadi penyakit kronis karena kita tahu bahwa urusan pemerintah bidang DLLAJ diserahkan kepada daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan PAD berdasarkan toleransi dari kelebihan muatan. Kebijakan pusat zero tolerance dan persoalannya saekarang apabila tidak bisa ditindak di jembatan timbang, bisa dilakukan di jalan dengan operasi gabungan. Hari kedua itu, Ketua KPK M. Yasin juga memberikan paparan (baca: Konsep Menangkal Korupsi Pelayanan Publik Ala KPK).

Tak ketinggalan Deputy Bidang

Pelayanan Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menyampaikan paparan berjudul 'reformasi Birokrasi Bidang pelayanan Publik berkaitan dengan Strategi Pelayanan Prima' Dalam paparannya disebutkan bahwa tujuan reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan, dengan sasaran meningkatkan kinerja birokrasi.

Dirlantas Babinkam Polri Brigjen Pol Drs Djoko Susilo Msi juga memberikan paparan panjang lebar mulai dari hasil penelitian fungsi lalu lintas hingga rencana quick wins 2010. Djoko mencatat dari hasil penelitian PTIK tercatat hasil yang menggembirakan bahwa persepsi masyarakat atas kinerja fungsi lalu lintas untuk transparansi tercatat 61.2%, responsivitas 70,66 %, performa atau disiplin 70,34%, tingkat kepercayaan 70,66% dan loyalitas 76.37%. Tapi Djoko menyayangkan karena penggunaan media belum dimanfaatkan secara maksimal. "Media obyektif tentang lalu lintas tercatat 51,71 %. Ini berarti pemberitaan media massa tentang lalu lintas tingkat kebenarannya hanya 51,71% sehingga diperlukan strategi media agar media dapat memberikan proses pembentukan opini publik secara memadai," tandas Djoko.

Hari ketiga Rakernis, Rabu (10/3) paparan kelompok diskusi, arahan Kadiv Humas Polri Irjen Drs Aritonang, demo Penggunaan SIM Smart oleh Tim IT dari Bank Rakyat Indonesia, dan terakhir pembulatan Rakernis oleh Dirlantas Babinkam Polri Brigjen Djoko Susilo.

REKOMENDASI

Tercatat tujuh kesimpulan yang dihasilkan oleh Rakernis yang berlangsung tiga hari itu. Kesimpulannya, pertama rakernis berjalan sukses dan sesuai jadwal yang ditentukan.

Kedua, pada rapat koordinasi diberikan penghargaan dan piala kepada jajaran Direktorat Lalu lintas tingkat Polda yang berkinerja terbaik

dengan mendasar pada beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan pada 2009.

Ketiga, hasil rapim Polri 2010 dijabarkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi merupakan penjabaran kebijakan Presiden RI, kebijakan Kapolri dan grand strategy Polri sebagai wujud dari patnership bulding (kemitraan) guna mewujudkan pekerjaan yang prima.

Keempat, pada kegiatan telah diberikan pembekalan baik dari internal pejabat kepolisian dan eksternal pejabat pemerintahan.

Kelima, seluruh peserta rapat koordinasi melakukan diskusi dan menjabarkan kebijakan Kapolri dari 21 quick wins yang ditetapkan peserta ditetapkan tiga program utama delapan quick wins dan dijabarkan dalam beban bersama aksi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan SDM, anggaran dan sarpras yang dimiliki oleh masing-masing kewilayahan.

Kesimpulan keenam peserta rapat koordinasi membuat komitmen bersama berisi pernyataan sikap dan kesanggupan melaksanakan akan hasil rakernis (program quick wins 2010 bidang Lantas).

Selanjutnya, yang menjadi kesimpulan penutup, peserta sepakat akan menindaklanjuti hasil rakernis dengan membuat laporan jadwal kegiatan quick wins 2010 selama satu tahun dan akan melaporkan kegiatan sebagai evaluasi ke Ditlantas Babinkam Polri tiap bulan.

Dirlantas Babinkam Polri, Brigjen Djoko Susilo dalam buku laporannya menyatakan dari kesimpulan tersebut, direkomendasikan bahwa dalam rangka pengendalian quick wins perlu dibentuk kelompok kerja dari tingkat Mabes hingga Polres dengan tugas melakukan supervisi, pengawasan serta evaluasi pada masing-masing tingkatan. "Evaluasi harus dilakukan setidaknya satu minggu. Untuk pemantauan serta evaluasi tingkat pengambil kebijakan evaluasi harus disimpulkan oleh masing-masing Polda untuk dikirim ke tingkat Mabes," kata Djoko.

Selain itu direkomendasikan pula, bahwa diperlukan direksi pada tingkat mabes kepada seluruh jajaran Polda agar memberikan dorongan dan memfasilitasi fungsi lalulintas untuk terus menerus melakukan inovasi yang membunmi dan mampu menjadi daya ungkit yang bisa

dirasakan oleh masyarakat dan organisasi. "Diperlukan pula direktit tingkat Mabes agar Polda dan Polres melakukan sinergfis dalam bentuk kerja sama dan saling mendukung sesuai job description dengan satuan fungsi lain," jelas Djoko lagi.

Rekomendasi lain yang disampaikan Rekernis agar fungsi lalu lintas memanfaatkan media massa membangun pembentukan opini dalam rangka membangun kepercayaan. "Kemudian rekomendasi lain yang disampaikan adalah bahwa akselerasi MoU kapolri dan Mendiknas perlu dorongan pada tingkat Mabes kepada semua kewilayahan agar memberikan dukungan dan memfasilitasi pembahasan Polda tingkat kewilayhaan antara Kapolda sampai kapolres dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat," kata Djoko Susuilo.

Rakernis yang dinilai banyak pihak memiliki muatan padat itu diyakini dapat menjadikan Polantas berfungsi sebagai instrumen struktural yang mampu mereformasi kultur Polri di bidang penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. [JT02]



Pemberian kelompok diskusi

Inna lillahi Wa Inna Ilayhi Rajiun



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Polri Pengadegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Turut berduka cita atas wafatnya



Ibu dr. Hj. Hasri Ainun Habibie

Istri Presiden ke-3 Negara Republik Indonesia Prof. Dr.-Ing B.J. Habibie

Pada Hari Sabtu,
Tanggal 22 Mei 2010 Pukul: 22.30 WIB

di RS Ludwig-Maximilians-Universitat, Klinikum Gro'hadern, Munchen, Jerman

Semoga Allah SWT mengampuni semua
dosa almarhumah dan memberikan tempat Yang terbaik di sisi-Nya,
dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan Kekuatan dan Ketabahan.

Amin

Pembacaan
KOMITMEN
BERSAMA dipimpin
oleh Kombes Pol.
Drs. Condro Kirono
dan diikuti oleh
seluruh peserta.



KOMITMEN BERSAMA JAJARAN DITLANTAS BABINKAM POLRI

Demi Masyarakat, Bertekad Tingkatkan Kinerja

RAKERNIS Fungsi Lalu Lintas se-Indonesia di Bidakara, Jakarta Maret lalu, terasa berbeda. Ada nuansa keyakinan yang menyatukan seluruh jajaran Ditlantas Babinkam Polri untuk terus melaksanakan hasil Rakernis sepenuh hati. Hal tersebut tergambar jelas dari Komitmen Bersama, yang dibacakan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Condro Kirono, Rabu (10/3) lalu, sebelum rakernis tersebut ditutup. Menurut informasi diperoleh Jagratara Komitmen Bersama itu masing-masing diwakili oleh satu Kasubdit, Kasat PJR, Kasubag Lantas, dan Kasat Lantas seluruh Indonesia.

Komitmen Bersama tersebut, terdiri dari dua poin. "Poin pertama menyebut para Dirlantas, para Kasubsi,

para Kasat PJR, para Kasubag Lantas, dan Kasat Lantas berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan-arahan yang disampaikan dalam Rakernis," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Condro Kirono.

Arahan yang akan ditindaklanjuti antara lain dari Kapolri, Irwasum Polri, Kababinkam Polri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri Dirlantas Babinkam Polri dan pejabat Kementerian instansi terkait.

Kemudian, poin satu hurup para b, berkomitmen membentuk aktualisasi kegiatan 2010, pejabat Ditlantas tersebut juga berkomitmen untuk melaksanakan program quick wins tahun 2010 dengan mendasari pada hasil evaluasi quick wins 2009, evaluasi program 100 hari, delapan program quick wins 2010, program road safety (13 program),

Kami juga sepakat melaksanakan kegiatan inovasi dengan memberdayakan potensi dan peran serta semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu kami juga berkomitmen mencegah penyimpangan dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat," kata Condro mengutip Komitmen Bersama tersebut.

Kemudian pada poin dua disebutkan bahwa Komitmen Bersama itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat. "Kami Belum Sempurna. Tapi Kami Selalu berusaha," tegas Condro Kirono.

Komitmen bersama tersebut mendapat apresiasi yang luar biasa dari pimpinan Polri dan diharapkan bukan sekadar komitmen melainkan menjadi sumber inspirasi bagi jajaran Ditlantas Babinkam Polri dalam meningkatkan kinerja. [jt02]

KONSEP MENANGKAL KORUPSI PELAYANAN PUBLIK ALA KPK

Rakernis hari kedua, Selasa (9/3) lalu menjadi bagian penting bagi jajaran Ditlantas Babinkam Polri dalam sisi penegakkan aturan. Hari itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moch Yasin hadir memberikan paparan tentang Strategi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik

DALAM paparannya Moch Yasin mengatakan ada dua faktor pendorong korupsi di layanan publik, yakni faktor eksternal dan internal.

Menurutnya, faktor eksternal biasanya terkait dengan kebiasaan masyarakat yang ingin serba cepat (instan) tidak ingin mengikuti prosedur serta lebih suka menggunakan jasa calo.

"Saya juga mencatat yang menjadi faktor eksternal lainnya adalah adanya kebiasaan pemberian sejumlah uang atau barang sebagai ucapan terimakasih setelah pengurusan pelayanan berakhir, serta ada pemahaman yang keliru bahwa uang dalam jumlah kecil bukan dianggap korupsi," ungkap Moch Yasin.

Selain itu proses sosialisasi yang tidak efektif terkait prosedur sehingga tidak ada kontrol yang kuat dari pengguna layanan. "Ini kebiasaan yang sebenarnya dapat dihindari," katanya lagi.

Sementara faktor internal yang mendorong terjadinya korupsi karena karena integritas pelaksanaan sistem yang masih rendah. "Yang paling menonjol pendorong korupsi dari faktor internal karena sanksi yang dikenakan bagi pelanggar karena tidak

menimbulkan efek jera," tandas Ketua KPK ini.

Jadi, kata Moch Yasin, untuk menghindarinya, bagi instansi yang bersangkutan, harus mempertahankan nilai integritas sekaligus melakukan upaya serius melakukan perbaikan dan peningkatan nilai layanan yang memiliki nilai integritas rendah.

"Intansi pelayanan juga harus melakukan evaluasi dan pengawasan terus menerus dari hasil perbaikan yang dilakukan.

Moch Yasin juga menyarankan agar instansi pelayanan seperti Ditlantas kerap melakukan sosialisasi yang intensif terkait perbaikan yang dilakukan baik kepada internal maupun eksternal sehingga perbaikan dapat dilakukan secara baik. "Saya yakin bila langkah ini dilakukan intansi pelayanan dapat menghindari dorongan negatif yang menjadi peluang dan berpotensi terjadinya korupsi," tegas Moch Yasin.

Sementara, KKP yang mempunyai wewenang pengawasan terkait instansi, kata Yasin, akan melakukan survey integritas secara periodik tiap tahun dalam rangka memacu unit layanan instansi untuk terus melakukan perbaikan.

"Bagi instansi pelayanan yang memiliki nilai integritas rendah akan terus kami monitoring dan lakukan koordinasi supervisi. Kami akan sarankan agar dilakukan perbaikan layanan publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik," kilah Yasin.

Kepada publik juga, lanjut Yasin, ada program khusus yang dilakukan KPK. Misalnya melakukan pendidikan kepada masyarakat pengguna layanan publik tentang budaya antikorupsi. "Cara ini kami lakukan terus menerus agar masyarakat menyadari buruknya nilai korupsi, yang kemudian menjadi antipati," katanya. [jt02]





IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Polri Pengadegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

BRIGJEN POL DRS. MUHAMMAD RUM MURKAL

SEBAGAI

KAPOLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*Selamat mengemban
tugas baru*



MOU KAPOLRI-MENDIKNAS

Membangun *Trust* Melalui Bangku Sekolah

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Ir Muhammad Nuh, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang mewujudkan pendidikan berlalulintas dalam pendidikan nasional.

PENANDATANGANAN tersebut dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas di Jakarta. Senin (8/3) lalu.

Menanggapi nota kesepahaman tersebut Muhammad Nuh mengatakan kerja sama memasukan pendidikan Lalu lintas dalam kurikulum nasional kepastian bisa membangun karakter

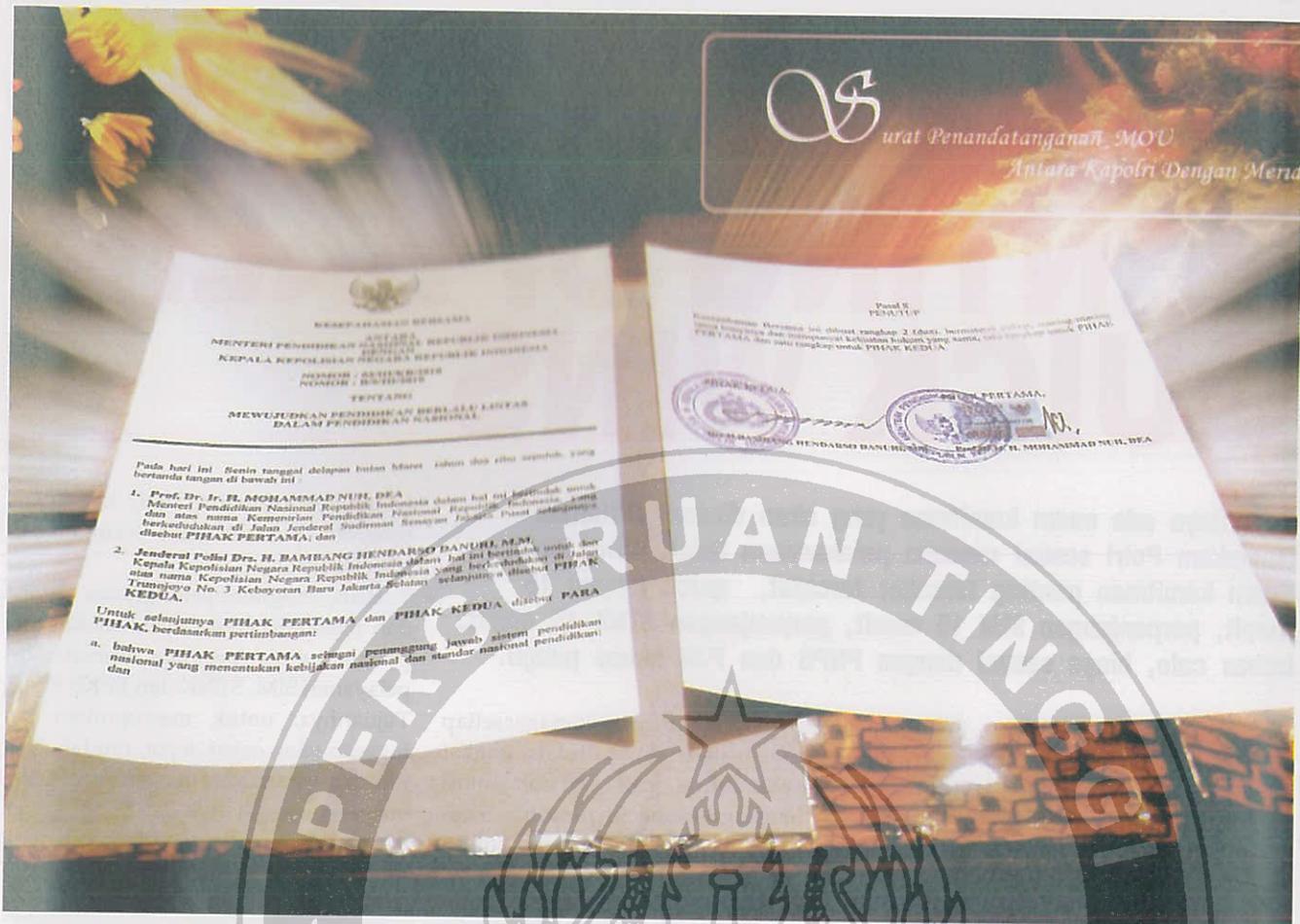
dalam bersiplin lalu lintas.

Untuk mencapai itu, menurut Muhammad Nuh, sedikitnya ada empat pilar yang harus dididirikan. "Pilar kepercayaan merupakan pilar terpenting. Pilar ini menjadi pilar utama," katanya.

Pilar kedua, mutual trust, saling percaya dan ketiga respect, saling menghargai dan menghormati karena di setiap institusi mempunyai peraturan



Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Mendiknas RI dengan Kapolri



berbeda. Dan keempat, pilar benefit atau kefaedahan untuk membangun budaya melalui dua pendekatan, pembiasaan dan intervensi.

Sementara Kapolri Bambang Hendarso Danuri menilai restru, trust (sebagai basic), kaitannya dengan disiplin lalu lintas mencerminkan budaya bangsa. Dalam periode tiga tahun terakhir, ungkapnya, korban kecelakaan yang meninggal dunia 20.000 (2007) dan pada 2008 naik jadi 20.128. Belum lagi yang mengalami luka berat.

"Kalau kita lihat dinamika itu beragam karena ada anggota Polri juga. Dinamikanya, laka lantas sangat memprihatinkan. Tidak hanya refresif pre-emptif," kata Kapolri.

Menurut Kapolri ada tiga unsur penyebab laka lantas. Human error, sarana dan prasarana serta produk otomotif. Tapi, yang paling menentukan faktor manusia.

Melihat data tersebut, korban kecelakaan sudah melebihi jumlah korban perang. Untuk menghadapi dinamika

tersebut, lanjut Kapolri, pihaknya sudah mencoba melakukan berbagai terobosan antara lain penandatanganan nota kesepahaman bersama. Internal Polri harus memberikan contoh.

"Kita harus dapat memberikan contoh dan ketauladanan sehingga trust dapat kita wujudkan. Karena itu MoU dapat kita lakukan dengan Ristek, dan atau DPR-RI," tandas Kapolri.

Pertanyaannya, apakah MoU dapat mengubah karakter dan budaya dalam tertib lalu lintas? "Bisa. Kita mempunyai komitmen melaksanakan perubahan. Kita menghindari anggota di lapangan melakukan pungutan yang merusak trust. Apalagi Polri sudah mendeklarasikan untuk tidak menyakiti masyarakat dengan melakukan pungutan," ulas Kapolri lagi.

ISI MOU

Isi nota kesepahaman tersebut menyebut Mendiknas sebagai pihak pertama disebut sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional yang menen-

tukan kebijakan nasional dan standar nasional. Sedangkan Polri penanggung jawab keamanan.

Tujuan MoU antara lain agar tercapai landasan moral yang kuat melalui integrasi nilai dalam pendidikan berlalu lintas. Terwujudnya perkembangan kompetensi untuk menjaga kamanan dan keselamatan diri dan orang lain serta memiliki tanggung jawab dalam berlalu lintas.

Selain itu tujuannya untuk tercapainya pengembangan kemampuan beraktivitas dan keterampilan menggunakan berbagai sarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta tercapainya pengenalan, pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Sedangkan ruang lingkupnya meliputi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Sedangkan biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepahaman ini dibenankan kepada anggaran kegiatan kedua belah pihak. MoU tersebut terdiri dari delapan pasal. [jt]

ENAM KOMITMEN PENTING DI BALIK QUICK WINS

Sedikitnya ada enam komitmen yang akan dicapai Ditlantas Babinkam Polri sesuai rencana pelaksanaan Quick Wins 2010. Enam komitmen penting tersebut tercatat, quick respon 15 menit, perpanjangan SIM 15 menit, perpanjangan STNK 15 menit, bebas calo, biaya sesuai dengan PNPB dan PJR bebas pungli.

DALAM buku Rencana Pelaksanaan Quick Wins Tahun 2010 Ditlantas Babinkam Polri yang diterbitkan Ditlantas Babinkam Polri disebutkan komitmen tersebut terkait upaya Ditlantas meningkatkan kinerja, perlu disusun rencana pelaksanaan quick wins 2010.

Rencana pelaksanaan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh jajaran lalu lintas sehingga ketika menyusun program dan kemudian mengimplementasikan ada arah dan target yang jelas.

Target tersebut diperlukan agar setiap periode evaluasi bisa diukur tingkat keberhasilannya pada implementasi di masing-masing wilayah. Dari visi tersebut, dari 21 program quick wins 2010, untuk fungsi lalu lintas, difokuskan pada enam komitmen tadi.

Hal tersebut dibenarkan Dir Lantas Babinkam Polri Brigjen Pol Drs Djoko Susilo, Msi baru-baru ini. "Untuk mencapai komitmen itu kita tetapkan delapan program quick wins, yang terbagi dalam tiga program induk yakni program peningkatan sarana dan prasarana Kepolisian, program

kerjasama keamanan dan ketertiban, program pemeliharaan Kamtibmas," jelas Dir Lantas.

Pada Program peningkatan sarana dan prasarana Kepolisian, difokuskan, pertama pada program transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB (SSB). Tujuannya, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, murah dan transparan dengan target utama perpanjangan SIM dan STNK hanya membutuhkan waktu 15 menit serta bebas calo pada seluruh pelayanan.

Dapat dirinci, pada bidang SIM yang terkait peningkatan pelayanan, hasilnya sangat mengagumkan antara lain menciptakan berbagai inovasi seperti inovasi pembuatan SIM Corner, inovasi SIM Komunitas dan inovasi penggunaan audio visual integrated system (AVIS) untuk ujian teori, sehingga dapat meraih sertifikat ISO 9001:2008 dan piala Citra Pelayanan Prima.

Masih pada bidang SIM, terkait zero complain terus diupayakan optimalisasi pelayanan pengaduan, standar waktu minimal pelayanan penerbitan SIM 15 menit, optimalisasi operasional SIM Corner dan optimalisasi operasional SIM keliling.

Sementara terkait zero deviation Ditlantas Babinkam Polri terus melakukan pelatihan SDM, pemberian penghargaan (reward) terhadap kinerja personel dan pemberian hukuman (punishment) terhadap personel

Pada bidang STNK, yang terkait peningkatan pelayanan Ditlantas Babinkam Polri berhasil melakukan inovasi Samsat Corner, Samsat Drive Thru, Samsat Door to door. Hasilnya cukup



HUMAS MABES POLRI

Brigjen Pol Drs Djoko Susilo SH, Msi dalam Rakornis Fungsi Lalu Lintas.

QUICK RESPONSE

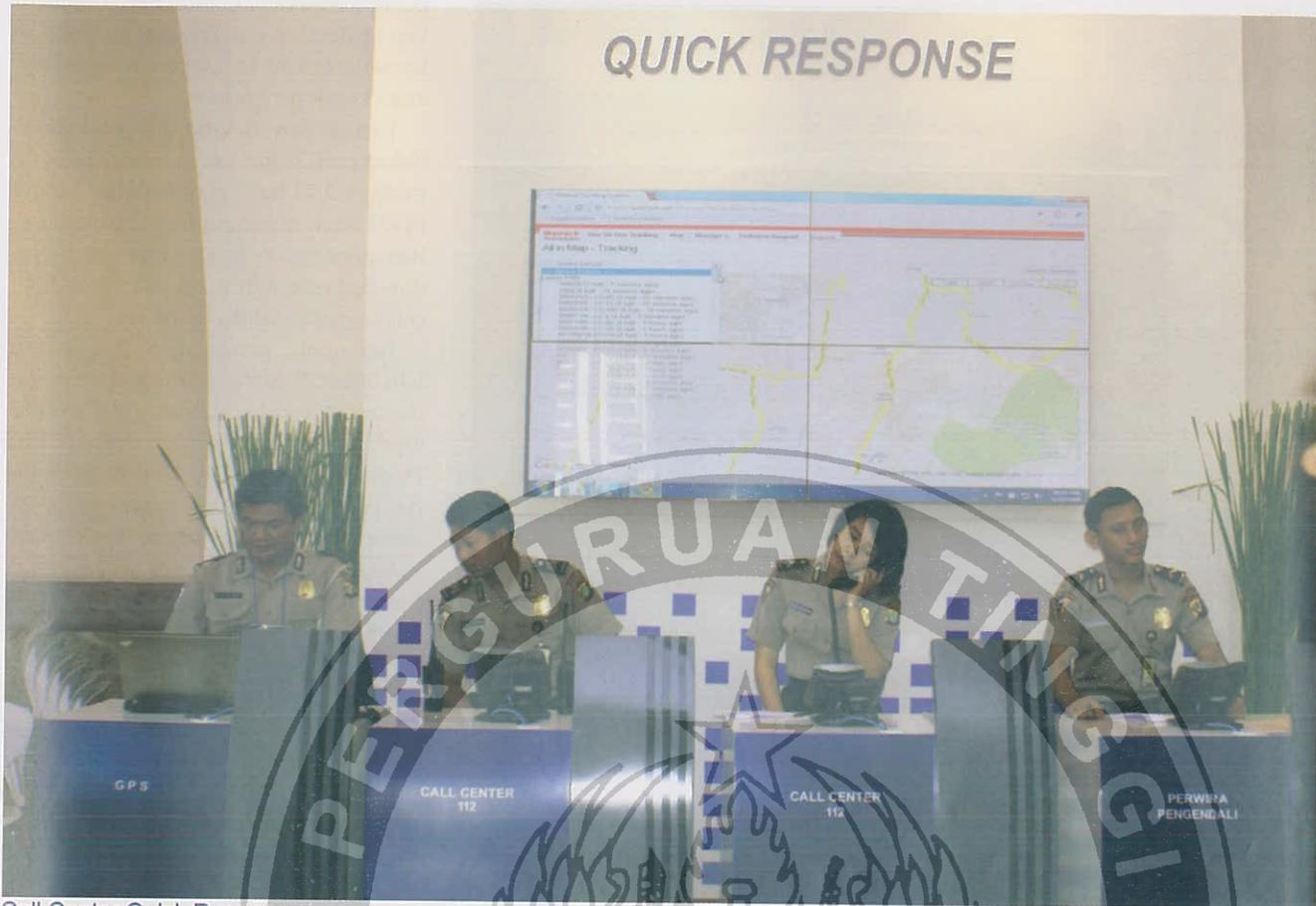


FOTO: EVA JAGRATARA

Call Center Quick Response.

memuaskan dengan meraih sertifikat ISO 9001:2008 dan Piagam Citra Pelayanan Prima.

Terkait zero complain diupayakan standar waktu pelayanan penerbitan STNK minimal 15 menit, optimalisasi Samsat Corner, optimalisasi Samsat Drive Thru, optimalisasi Samsat keliling dan optimalisasi operasional pelayanan pengaduan.

Sedangkan terkait zero deviation bidang STNK Ditlantas selalu melakukan pelatihan SDM, pemberian penghargaan dan pemberian hukuman.

Pada bidang BPKB terkait peningkatan pelayanan kini sudah berlangsung komputersasi BPKB. Begitu baiknya kinerja petugas sehingga dapat meraih Sertifikat ISO 9001:2008 dan Piala Citra Pelayanan Prima.

Djoko Susilo mengakui hasil yang diraih melalui penyusunan program tersebut merupakan keberhasilan seluruh anggota Ditlantas dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Saya memberikan apresiasi bagi kinerja aparat Polantas,"

katanya.

Masih dalam program induk peningkatan sarana dan prasarana, yakni mewujudkan akses transparansi on line, Ditlantas Babinkam Polri kini susah menerapkan pelayanan sistem informasi SIM on line, informasi STNK on line dan sistem informasi BPKB on line

Program lainnya dari peningkatan sarana adalah mewujudkan iptekpol online. Program ini Ditlantas sudah bisa menyajikan data kecelakaan lalu lintas secara on line, penyajian data pelanggaran on line dan data kemacetan secara on line.

Menyangkut perangkat informasi teknologi kepolisian, Ditlantas berhasil membangun National Traffic Management Centre (NTMC) sebagai pusat komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi dan Pusat Pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.

Yang terakhir dari program peningkatan sarana atau program ke lima dari delapan program quick wins adalah program mewujudkan hukum kepoli-

sian on line. Ditlantas melakukan pembangunan sistem law enforcement dan pengembangan SIM sebagai alat bayar denda tilang.

Program induk kedua dari delapan program quick wins, Program kerjasama keamanan dan ketertiban, meliputi program keenam adalah implementasi strategi Polmas terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan program ini Ditlantas kerap melakukan, pertama sosialisasi UU No. 22/2009 (police goes to campus, lomba cerdas cermat LLAJ, duta lalu lintas, raja dan ratu helm, safety riding, pembinaan KTL, pesan Klamseltincarlantas melalui komunitas kesenian, pembinaan tertib lintas melalui twitter dan face book, dan penerapan klik byar).

Kedua, pembinaan potensi masyarakat, meliputi pembinaan klub otomotif, apel besar masyarakat pencinta tertib lintas, pembinaan ojek, optimalisasi peran PKJR, Saka Bhayangkara Krida Lu lintas, polisi keamanan sekolah (PKS), cara aman ke sekolah, inspektur upacara di sekolah dan Polantas peduli



Pembagian peta mudik oleh Polantas.

FOTO: EWA/JAGRATARA

korban laka lantas.

Ketiga, pengembangan Polmas. Yang sudah dilakukan antara lain pembinaan sekolah mengemudi, polisi sahabat anak, intensifikasi strategi Polmas desa, taman lalu lintas, taman lalin tempores, Dai Tertib Lalin.

Program induk ke tiga, Pemeliharaan Kamtibmas, yang meliputi program ke tujuh dari delapan program quick wins, yakni Ketanggapsegeraan (quick respon). Untuk mencapai program ini, Dirlantas mematok standar waktu petugas gatur untuk mendatangi TKP kecelakaan dalam waktu 15 menit, dengan program unggulan smart service pelayanan petugas Gatur yang peka terhadap masalah keselamatan, komunikatif, penampilan prima, pemecahan masalah, kampanye keselamatan.

Kemudian ditetapkan pula standar waktu petugas pengawalan dan patroli (Patwal) mendatangi TKP kecelakaan paling lama 15 menit dengan program unggulan Patroli Pro-aktif mengenali wilayah, menentukan karakteristik wilayah, cepat dan tanggap menangani masalah Kamtibselcarlantas, serta komunikatif dan mampu membangun jejaring (network).

Bagi PJR ditetapkan standar waktu 15 menit pula dengan program unggulan road safety, petugas harus mengutamakan keselamatan pemakai jalan tol, komunikatif, kemitraan, mampu memetakan karakteristik kerawanan wilayah, kampanye keselamatan),

Bagi unit Laka Lantas ditarget mendatangi TKP dalam waktu 15 menit dengan program unggulan community safety. Serta Polantas bersepatu roda dalam mengurai kemacetan.

Yang terakhir dari delapan program quick wins adalah Penanganan Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam program ini Dirlantas menetapkan enam program.

Pertama, peningkatan pelayanan penanganan kecelakaan lalulintas. Polantas harus profesional dalam penanganan dan olah TKP, optimalisasi SP2HP, pelayanan terpadu pengurusan jasa raharja dan unit terpadu penanganan TKP.

Kedua, zero complain. Untuk menca-

pai titik tersebut Polantas harus melakukan optimalisasi pelayanan pengaduan kecelakaan lalu lintas, pemasangan layanan kotak pengaduan.

Ketiga, zero devitio. Polantas diwajibkan melakukan penyelesaian perkara maksimal 21 hari, pengambilan barang bukti tidak dipungut biaya, penangguhan penahanan tidak dipungut biaya, dan penyelesaian tunggakan kasus kecelakaan dua tahun terakhir.

Keempat, pencegahan kecelakaan lalu lintas. Polantas harus giat mapping daerah rawan kecelakaan (black spot). Optimalisasi kerja sama dengan PU, Dephub, Deperindag, Menristek, Penda, pendataan rambu, mapping rawan kemacetan, pembentukan forum lalu lintas, optimalisasi pengkajian emisi gas dan peningkatan Korwas PPNS.

Program kelima, penindakan pelanggaran lalu lintas. Kendati pengemudi bersalah, petugas tetap harus simpatik dengan blanko teguran simpatik, melakukan tindakan rambu larangan berhenti, pelanggaran potensial timbulkan kecelakaan, melakukan tindakan bagi pelanggar penggunaan sirene rotator yang tidak sesuai dengan UU No. 22/2009.

Program keenam, pengembangan kreativitas dan inovasi dari kearifan lokal pada masing-masing Polda. Jadi, kata Dirlantas Babinkam Polri, program tersebut menjadi pedoman agar seluruh jajaran Dirlantas di seluruh Indonesia dapat mencapai target optimal dalam melaksanakan tugasnya. 0 JT02



FOTO: HUMAS POLRI

Razia kendaraan bermotor



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Polri Pengadegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

BRIGJEN POL DRS. MUHAMMAD RUM MURKAL
SEBAGAI KAPOLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOMBES POL DRS. I KETUT UNTUNG YOGA ANA, SH, MM
SEBAGAI WAKA POLDA GORONTALO

KOMBES POL DRS. KODIRUN KARYA
SEBAGAI KABAG MINDIK DIT AKADEMIK PTIK

KOMBES POL DRS. BUDI WASESO
SEBAGAI KAPUS PAMINAL DIV PROPAM POLRI

KOMBES POL DRS. HENGKIE KALUARA
SEBAGAI KABID LITPERS PUSPAMINAL DIV PROPAM POLRI

KOMBES POL DRS. BAMBANG SRI HERWANTO MH
SEBAGAI KABID KUMDANG DIV BINKUM POLRI

KOMBES POL DRS. OERIP SOEBAGYO
SEBAGAI PENYIDIK UTAMA TK I DIT I/KAM DAN TRANNAS BARESKRIM POLRI

KOMBES POL DRS. MUSYAFAK SH, MM
SEBAGAI KABAG BINGADIK DIT BINDIK LEMDIKLAT POLRI

KOMBES POL DRS. RAHYONO WIGNYO S
SEBAGAI KARO OPS POLDA LAMPUNG

KOMBES POL DRS. EDI PURWANTO
SEBAGAI PENYIDIK UTAMA TK II DIT IV/NARKOBA DAN OC BARESKRIM POLRI

KOMBES POL DRS. SYAIFUL BACHRI D SH
SEBAGAI PAMEN POLDA JATIM (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS)

KOMBES POL DRS. SUKIRMAN
SEBAGAI PAMEN POLDA JATENG (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS)

KOMBES POL DRS. TREE JALDI
SEBAGAI PAMEN LEMDIKLAT POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS)

Selamat mengemban tugas baru

RENSTRA DITLANTAS BABINKAM POLRI 2010-2014

BEBAN TUGAS POLANTAS KIAN KOMPREHENSIF

Reformasi di tubuh Polri berjalan hampir sepuluh tahun, sejak pemisahan Polri dari ABRI pada 1 April 1999 lalu. Guna mencapai visi Polri ke depan, banyak program unggulan, yang disusun Polri, yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan Polri dalam bentuk Rencana Strategis (Resnstra)

ANTARANYA, pada Renstra tahap I tahun 2005-2009 telah disusun delapan program. Dan, Renstra tahap kedua, 2010-2014, yang kini sedang berjalan, ditingkatkan menjadi tiga belas (13) program.

Ke tiga belas program itu; dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, pengawasan melekat dan akuntabel aparat Polri, peningkatan sarana dan prasarana Polri, penelitian

dan pengembangan teknologi Polri, pengembangan SDM, pendidikan dan latihan Polri, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, kerjasama keamanan dan ketertiban, pemberdayaan potensi keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penanggulangan gangguan keamanan kadar tinggi, dan pengembangan hukum.

Direktur Lalu Lintas Babinkam Polri Brigjen Pol Drs Djoko Susilo, Msi meya-



Apel Polantas PMJ



FOTO: EWA/JAGRATARA

Polantas memberikan brosur berisi informasi keselamatan bagi pengendara

kini bahwa ke-13 program itu sangatlah penting untuk pengembangan Polri ke depan.

Terlebih lagi, kata Djoko Susilo, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memberikan direktif agar dikembangkan sasaran kegiatan Polri yang memiliki daya ungkit (key leverage) yang kuat atau quick wins.

Setiap enam bulan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja masing-masing Satker untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perencanaan program yang telah disusun dan target yang dicapai. "Kapolri menginginkan ada evaluasi seperti itu. Hal ini sudah disampaikan Kapolri ketika menutup Rapim Polri," ulas Djoko Susilo.

Khusus fungsi lalu lintas, tandas Djoko, penjabaran yang dilakukan tetap mengacu pada visi dan misi Polri, yang pada tahun 2010-2014 adalah terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalannya sinergi polisional yang pro-aktif.

"Berdasarkan visi Polri itu, Ditlantas Babinkam Polri menetapkan visi Polantas 2010-2014, yakni terwujudnya pelayanan Kamseltibcarlantas Prima, Kesadaran dan kepatuhan Berlalu Lintas serta terjalannya sinergi Polisional Pro-aktif," jelas Djoko.

Visi Ditlantas Babinkam Polri ter-

sebut, tentunya sangat bersesuaian dan merupakan jawaban atas agenda perubahan dan pembenahan kultural Polri dalam rangka membangun dan mengembangkan Polri lebih baik.

Sekaligus, merupakan penjabaran dari arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka Rapim Polri pada 8 Februari 2010. Ketika itu, Presiden menegaskan bahwa Polri merupakan komponen yang sangat berperan dalam pembangunan nasional. Karena itu, presiden meminta jajaran Polri terus meningkatkan proteksi, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dalam kaitan peningkatan kinerja, Presiden menegaskan agar Polri tetap mengacu pada tiga peran konstitusional Polri yakni menjaga kamtibmas (law and order), memerangi kejahatan (fighting crimes) dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat (protecting and serving the people).

Masih menurut Djoko Susilo, apa yang ditekankan Presiden tersebut menjadi bagian penting yang mendasari penyusunan program lalu lintas jangka menengah yang kini sedang dijalankan.

BLUE PRINT POLANTAS

Pada bagian lain penjelasannya, Dir Lantas Babinkam Polri Brigjen Pol Drs Djoko Susilo menjelaskan beberapa bagian penting dari Renstra satuan kerja yang dipimpinnya itu. Antra lain soal Blue Print Polantas.

Pertama, yang menyangkut sasaran pengembangan. Sasaran pengembangan ini, menurutnya dirinci menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polantas, dan Pengembangan sarana dan prasarana.

Secara teoritis, ungkap Djoko Susilo, keberhasilan suatu negara ditentukan oleh tiga faktor. Ketiga faktor itu, pembangunan ekonomi, penguasaan dan aplikasi teknologi serta sumber daya manusia.

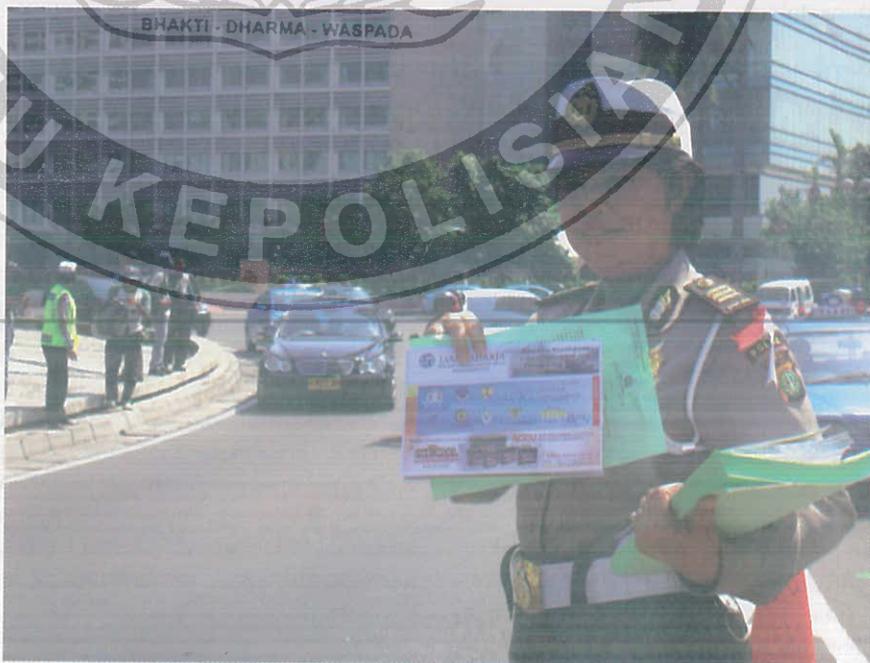


FOTO: EWA/JAGRATARA

Polantas memberikan brosur berisi informasi keselamatan bagi pengendara

Indonesia

"Kuantitas sumber daya manusia (SDM) Polantas kondisinya sangat tak seimbang. Saat ini, rata-rata ratio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah 0,53. Artinya, setiap satu meter terdapat dua penduduk. Panjang jalan pada 2008 adalah 431.603 km dan jumlah petugas lalu lintas sebanyak 37.514 orang. Ratio Polantas dan panjang jalan adalah 1:11. Setiap orang Polantas harus mampu memberikan pelayanan atas tugas kepolisian sepanjang 11 km," jelas mantan Kapolres Bekasi dan Kapolres Jakarta Utara ini.

Menurut Djoko, jika dengan asumsi pertumbuhan panjang jalan tiap tahunnya adalah 2 % pada 2009 panjang jalan jadi 440.236 km, maka kebutuhan Polantas agar mampu memberikan pelayanan tugas kepolisian seperti kondisi saat ini adalah sebanyak 40.022 Polantas. "Hal ini memberikan arah bagi Ditlantas Polri dalam mengembangkan personilnya secara kuantitas sampai 2014 mendatang," kata Djoko.

Kemudian, menyangkut kualitas SDM Polantas, menurut Djoko, hal ini merupakan harga mati. "Kualitas SDM Polantas harus selalu ditingkatkan. Terlebih bila kita mengkaitkan dengan rata-rata pertambahan penduduk 1,2% tiap tahunnya. Sementara jumlah kendaraan meningkat 16 %, mau tak mau kita harus meningkatkan SDM Polantas baik pengetahuan teknis maupun formal," ujar jenderal berbintang satu ini.

Di sisi lain, tambah Djoko Susilo, ketentuan UU No. 22/2009 mengamanatkan tugas Polantas kian berkembang. Dalam UU tersebut, Polri mendapat tugas pokok melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

Berarti, beban tugas Polantas kian komprehensif karena berbagai hal harus ditangani. Tugas yang harus dilakukan Polri, antara lain pengujian dan penertiban surat izin mengemudi (SIM), pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan. Pengumpulan, pemantauan dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelolaan pusat pengendalian informasi Lalu



FOTO: EVA/JAGRATARA

Ujian SIM kendaraan roda dua

Lintas dan angkutan jalan, pengaturan, pengawalan dan Patroli Lalu lintas, penegakan hukum, pendidikan berlalu lintas, dan lain-lain.

"Mengingat beban tugas kian berat dan konfrehensif tersebut, kualitas SDM juga harus ditingkatkan. Khususnya perwira harus memiliki kemampuan pertama kemampuan manajemen dan pengelolaan data lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, kemampuan manajemen keamanan dan keselamatan lalu lintas, dan ketiga, kemampuan manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas," papar Djoko Susilo.

Di Ditlantas Babinkam Polri sendiri, kilahnya, terdapat satu sistem semacam kompetensi bagi anggota Lalu lintas, yang meliputi kompetensi inti keterampilan (penegakan hukum, komunikasi sosial, interpersonal, pengelolaan lalu lintas, pengelolaan keanekaragaman, pengelolaan administrasi, dan penguasaan Bahasa Inggris).

"Kemudian, kami juga menerapkan kompetensi inti pengetahuan mekanisme kerja Polantas, kompetensi inti sikap yang meliputi integritas dan pelayanan prima, dan kompetensi inti kepemimpinan dan manajemen, yang meliputi kepemimpinan, pencegahan masalah dan pengambilan keputusan, mengelola sumber daya lalu lintas, dan menjadi agen perubahan," jelas Dirlantas.

Kemudian, menyangkut pengem-

bangsan sarana dan prasarana. Hal ini sangat penting, terutama dalam upaya peningkatan jumlah kendaraan dalam rangka menunjang tugas.

"Penambahan kendaraan sangat perlu. Penambahannya disesuaikan dengan nilai utilitis tahun sebelumnya. Misalnya, apabila dari 6.859 kendaraan yang ada tahun 2008, yang dipakai 3.000 dengan jumlah personel 37.514 maka ratio jumlah kendaraan dan petugas 1:13. Artinya dengan pembagian tiga shift maka satu kendaraan digunakan 4 sampai 5 petugas, dengan asumsi kendaraan tersebut beroperasi terus. Dengan kondisi ini, yang awalnya usia pakai lima tahun kondisi normal bisa jadi tiga tahun. Artinya 3.000 unit kendaraan tahun 2008 akan habis masa pakainya atau penyusutan 33,3 % pertahun) pada tahun 2011," katanya.

Dengan nilai penyusutan tersebut, penambahan jumlah kendaraan minimal mendekati angka 40 % dari jumlah kendaraan siap pakai tahun tersebut. "Dengan jumlah itu, petugas dapat mempertahankan kinerjanya seperti saat ini," ulas Djoko.

Selain itu, diperlukan pula sarana dan prasarana pendukung. Menurut Djoko Susilo, untuk mendukung mobilitas yang tinggi, penyediaan sarana pendukung perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan nilai kegunaannya.

Perhitungannya, kata Djoko, dengan asumsi penyusutan 10 % tiap ta-

hunnnya. Maka peningkatan sarana pendukung tiap tahunnya 12 %. "Sebagai ilustrasi, jumlah sarana tahun 2008 sebesar 239.403, yang siap pakai 200.000, maka tahun 2009 perlu diadakan peningkatan sebesar 24.000 dan tahun 2010 menjadi sebesar 24.192. Dan, melihat data pertumbuhan Polantas tiap tahunnya sebesar 2 %, kebutuhan sarana harus mampu memberikan dukungan pada fungsi $3e + 1i$, yakni penegakan hukum, pendidikan berlalu lintas, rekayasa lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor," urai mantan Dirlantas Polda Metro Jaya ini.

PEMBANGUNAN SISTEM

Yang tak kalah penting, kata Djoko lagi, adalah bagaimana Ditlantas Babinkam Polri dapat melakukan pembangunan sistem, yang juga merupakan bagian dari Renstra Ditlantas.

Mengapa? Karena transparansi dan sistem informasi yang terbuka serta terintegritas merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas yang baik. Pengguna jalan juga memiliki hak untuk mendapatkan

akses terhadap informasi penting.

Penyebaran informasi yang dilakukan Ditlantas melalui transparansi sistem informasi dapat menyediakan informasi rinci yang diperlukan masyarakat pengguna jalan, industri dan perusahaan pengangkutan darat untuk mengambil keputusan.

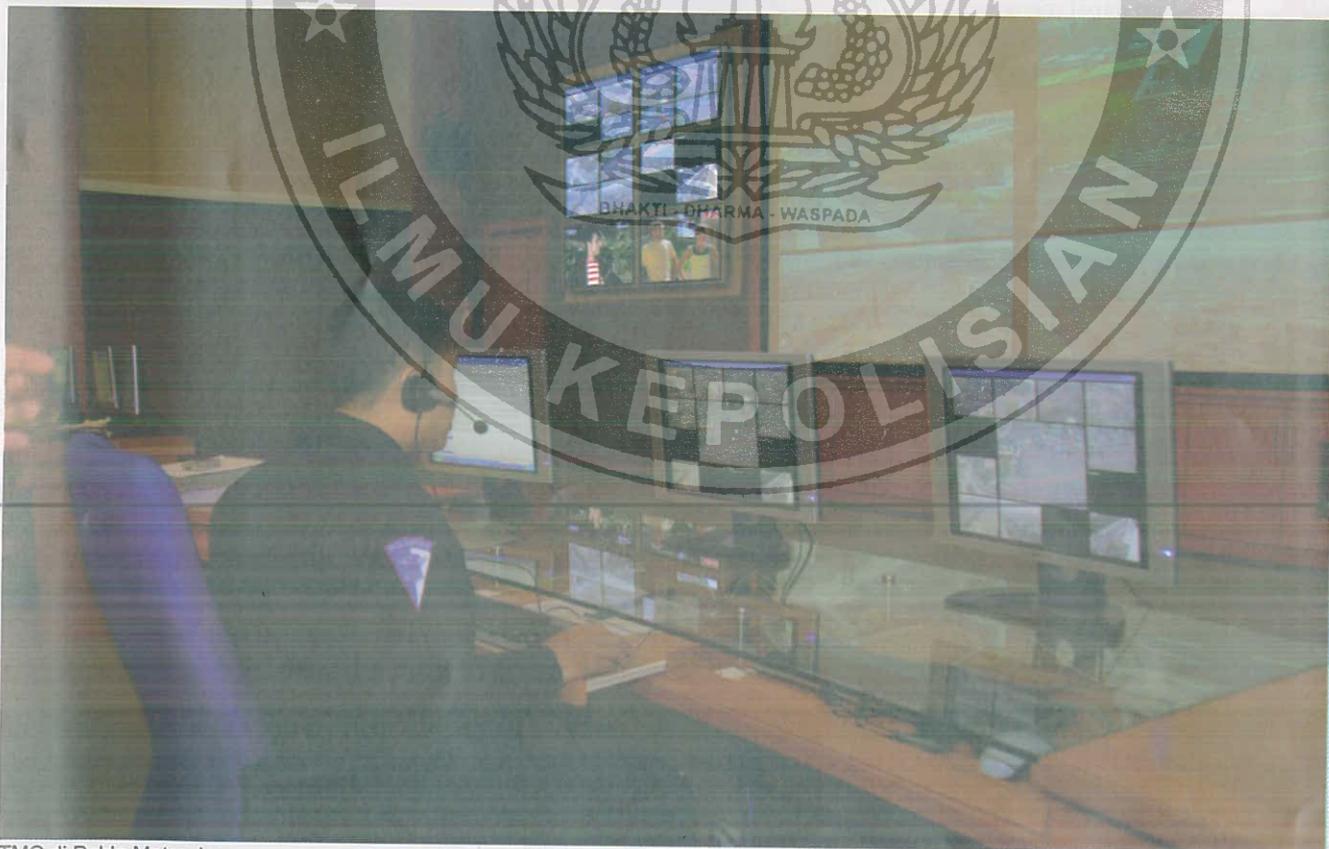
"Karena itu, untuk memenuhi dan mendukung hal tersebut perlu dibangun pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan darat secara terpusat dan terpadu antara pemangku kepentingan di bidang lalu lintas dan angkutan darat, serta Polri secara umum, yang meliputi Pembangunan Sistem Polantas serta Pembangunan Jaringan Pendukung Sistem Polantas," urai perwira lulusan Akpol tahun 1984 ini.

Pembangunan Sistem Polantas, lanjutnya, mengacu pada mobilitas penduduk yang kian tinggi dan merata. Polantas harus dapat memberikan pelayanan efektif. Untuk itu Ditlantas harus memiliki sistem yang tepat dan berkelanjutan yang didukung oleh teknologi, sehingga dengan keterbatasannya, Polantas dapat memberikan

pelayanan maksimal.

Lagi pula, ungkap Djoko, pembangunan sistem sangatlah mendesak sesuai amanat UU No. 22/2009, fungsi Polri sebagai koordinator Forum LLAJ, Pusat Pengendalian info LLAJ serta koordinator keamanan dan keselamatan. Mau tak mau, melihat beban tugas Polri yang konfrehensif tersebut, pembangunan sistem Polantas strateginya diprioritaskan pada dua hal. Pertama, pembangunan National Traffic Management Center. Dan, prioritas kedua, membentuk Forum LLAJ, yang merupakan badan ad hoc secara terpadu dengan stake holder dibidang LLAJ.

Sementara, menyangkut Pembangunan Jaringan Sistem Pendukung Polantas, juga tak terlepas dari pengimbangan terhadap pertumbuhan yang kian merata. "Pembangunan jaringan pendukung tersebut kita harapkan segera dapat on line mulai dari tingkat Polres, Polda dan Ditlantas Babinkam Polri yang terintegritas dalam satu sisten National Traffic Management Center," urai Djoko Susilo mengakhiri keterangannya. 0 JT02



TMC di Polda Metro Jaya

FOTO: HUMAS PMJ

Irwasum Komjen Drs Nanan Sukarna:

WASRIK TERHADAP FUNGSI SAMAPTA DILAKUKAN DUA TAHAP

Irwasum Polri Komjen Pol Drs Nanan Sukarna mengatakan hasil Analisa dan evaluasi Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) terhadap Fungsi Samapta 2009 masih terdapat setidaknya tiga kelemahan, yang semestinya dapat dihindari.

KELEMAHAN tersebut, produk naskah rencana kegiatan Satker/sub Satker Samapta belum dapat menggambarkan berapa jumlah personel yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan patroli Samapta perhari.

Kemudian, surat perintah dan laporan hasil patroli Samapta belum menjawab atau mengantisipasi adanya jam rawan serta tempat rawan sebagaimana analisa yang dibuat oleh Biro atau bagian operasi satker.

Kelemahan ketiga di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang anggarannya di atas Rp5 juta sampai dengan Rp50 juta tidak menggunakan metode pemilihan pengadaan jasa melainkan metode pemilihan langsung.

Hal ini ditegaskan Irwasum Komjen Drs Nanan Sukarna ketika memberikan arahan pada Rakernis Samapta di Jakarta, Rabu (7/4) lalu. "Irwasum Polri selaku aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan serta perbendaharaan umum lebih mengedepankan perannya sebagai konsultan dan mitra kerja, serta berkedudukan



Arahan Irwasum Polri Komjen Pol. Drs. Nanan Sukarna

sama dengan obyek Wasrik," katanya.

Karena itu, katanya, selanjutnya tahapan pemeriksaan pelaksanaan Wasrik tahun ini akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap diarahkan untuk melakukan pemeriksaan pada aspek perencanaan dan pengorganisasian. Sedangkan pada tahap kedua adalah pemeriksaan pada aspek pelaksanaan dan pengendalian.

Sasaran Wasrik tahun ini, urai Nanan Wasrik dilakukan agar dapat terlaksananya kegiatan wasrik terhadap Satker di lingkungan Polri yang dilaksanakan berdasarkan analisa resiko. "Diprioritaskan pada Kinerja Satuan Reskrim, Narkoba, Lantas, Polair, Samapta, Personel dan Dokkes," tandas Nanan Sukarna.

Selain itu, sasaran pengawasan terhadap penyaluran Dukgar sampai ke

pada petugas pelaksana pelayanan di lapangan, pengawasan terhadap sistem Pengamanan Wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni sampai pengawasan terhadap pembangunan yang tertunda tahun anggaran 2008/2009 dengan prioritas markas komando, SPN, pembangunan pasca gempa, dan pembangunan dermaga atau pangkalan gerak.

"Sasaran lainnya yang tak kalah penting adalah pengawasan terhadap program unggulan berupa quick wins di setiap Satuan Wilayah (Satwil), sekaligus meningkatkan kualitas dan kemampuan personel dalam rangka pengawasan inventarisasi BMN dan Simak BMN Polri serta memberikan arahan dan bimbingan peran sebagai konsultan pada obyek Wasrik," kilah mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

TEMUAN MENONJOL

Selain memberikan arahan agar menyangkut Wasrik tahun lalu, Irwasum juga memaparkan hasil Wasrik tahap I Fungsi Samapta tahun 2010. Pada tahap I Wasrik ini juga masih ditemukan susunan rencana yang belum sesuai dengan pedoman dan kurangnya dokumen pendukung. "HTCK yang disusun juga masih tumpang tindih atau rancu dengan materi job description," kata Nanan Sukarna.

Selama pengawasan dan pemeriksaan tahap I terdapat temuan menonjol, pertama dibidang Garku dimana Perwabku biaya turjawali tidak dilengkapi dengan absensi serta dasar pembayaran uang saku dan makan pada rekap data dari satuan fungsi tidak pada realisasi kehadiran.

Bidang Matlog terdapat temuan menonjol bahwa Har Ranmor tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur Keppres No.80 tahun 2003. "Bidang SDM ditemukan temuan menonjol dimana kualitas SDM belum dapat mendukung tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Samapta secara optimal," jelas Nanan.

Temuan menonjol bidang Opsnal, lanjut Nanan, antara lain pelaksanaan patroli tidak didasarkan pada kerawanan dan karakteristik daerah serta analisa tempat dan jam rawan. "Ditemukan pula

Police back bone juga belum optimal," aku Nanan dalam pengarahannya.

Guna memperoleh hasil kinerja yang optimal, dalam kesempatan itu, Irwasum membeberkan secara luas tiga misi dari delapan misi Polri tentang Pelaksanaan Fungsi Samapta. Bahwa, tiga misi tersebut bagi fungsi Samapta adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. "Dan, misi ketiga mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri," papar Nanan Sukarna.

Menurut Irwasum, kandati masih ditemukan kekurangan, harapan terhadap fungsi Samapta sangat besar. Karena itu Irwasum memberikan arahan agar anggota jajaran Samapta memahami dan melaksanakan tugas pokok Fungsi Samapta sebagai tulang punggung Polri (police back bone).

"Samapta juga mengemban tugas pengendalian massa secara profesional dalam rangka memelihara ketertiban umum. Polri juga berharap agar Samapta dapat meningkatkan program quick wins melalui quick response fungsi Samapta," kata Irwasum.

Selanjutnya, agar harapan terhadap fungsi Samapta tercapai, Irwasum Nanan Sukarna, memberikan arahan agar fungsi Samapta selalu mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan Polri.

Samapta juga harus memberdayakan keberadaan Irwil, Irbid dan auditor Irwasum Polri sebagai konsultan. "Kepada para Kasatker selaku kuasa pengguna anggaran juga diingatkan agar memahami benar perannya dalam melaksanakan program dan anggaran," tegas Nanan Sukarna.

Fungsi Samapta juga harus aktif menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan pro-aktif berkomunikasi dengan BPK-RI. "Reward and Punishment juga agar dilaksanakan Kasatket dengan obyektif, profesional dan konsisten dan transparan," imbuhnya.

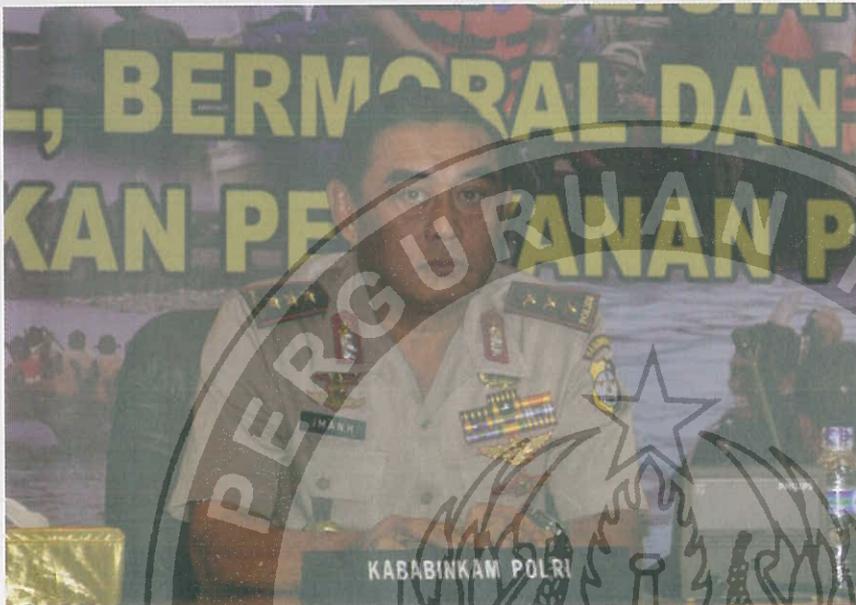
Kendati demikian, ujar Nanan Sukarna, ada hal yang menggembirakan karena proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolokukur yang telah ditetapkan secara efektif, dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. [jet]



Sesi tanya jawab pada materi yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan

KABABINKAM POLRI KOMJEN POL DRS IMAN HARYATNA

QUICK RESPON FUNGSI SAMAPTA PUASKAN MASYARAKAT



Rakernis Samapta Polri 2010, Rabu (7/4) dilaksanakan di Jakarta. Rakernis itu sendiri ini merupakan wahanan dan momentum yang sangat penting dan strategis karena dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Rapim Polri yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membahas banyak hal. Antara lain rencana strategis kegiatan Polri tahun berjalan dan kebijakan Renstra Polri pada tahap kedua, yaitu membangun kemitraan.

Seperti diungkap Kababinkam Polri Komjen Drs Iman Haryatna dalam amanatnya bahwa grand strategy Polri tahap pertama yaitu membangun kepercayaan masyarakat sudah dilalui, hal tersebut menjadi landasan yang kokoh dalam rangka membangun kemitraan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri.

Terlebih lagi, ungkap Iman Haryatna, saat ini situasi dan kondisi lingkungan global, regional, nasional maupun lokal terus berubah dan bergerak dengan cepat seiring dengan

dinamika yang memberi pengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Polri, termasuk fungsi Samapta. "Grand Strategy tahap pertama membangun kepercayaan sudah kita lalui, tapi tingkat kepercayaan masyarakat belum sesuai seperti yang kita harapkan," kata Kakabinkam. "Hal ini sangat berpengaruh terhadap optimalisasi hasil yang dicapai," tambah Iman Haryatna.

Menyikapi hal itu, jajaran Samapta harus cerdas dan piawai menentukan pilihan dan langkah strategis serta kegiatan nyata, Samapta harus

memberikan pelayanan prima berupa perlindungan, pengayoman dan penggelaran polisi berseragam sebanyak-banyaknya.

"Karena itu, saya menganggap sangatlah relevan bila rakernis mengangkat tema Dengan Semangat Kemitraan Kita Bangun Samapta Polri sebagai Pengemban Tugas Polisi umum dan Police Back Bone yang Profesional, bermoral, dan Modern Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima," kilah Iman Haryatna.

Mencermati tema itu, Iman Haryatna mencatat tiga variabel penting untuk diketahui dan dibahas. Variabel pertama membangun kemitraan yang dilandasi tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui tugas Samapta diharapkan dapat memperkokoh kemitraan.

"Ini sangat relevan karena tahun ini Polri memasuki Renstra tahap kedua tahun pertama yaitu membangun kemitraan dengan melanjutkan renstra tahap pertama," papar Iman Haryatna.

Menurut Iman Haryatna, polisi masa depan adalah polisi sipil yang mengedepankan profesional dan lebih mengutamakan peran serta kemitraan dan pemecahan masalah.

"Untuk menunjukkan jati diri yang responsif, humanis, mampu berkomunikasi dari hati-hati dengan masyarakat. Sedangkan bentuk kemitraan Polri dan masyarakat dapat melalui community policing atau Polmas, yaitu bentuk polisi sipil yang ikut serta dalam menciptakan dan menjaga ketertiban dan keamanan," papar Iman Haryatna lagi.

Pada variabel ketua, lanjut Iman Haryatna, pembenahan dalam upaya membentuk sosok Samapta yang profesional, maka segala upaya

pembenahan dilakukan baik penataan struktur organisasi

"Samapta adalah polisi berseragam yang pertama-taman akan menjadi cermin contoh karena mereka yang terutama menjadi pelaksana tugas pokok dalam memelihara keamanan. Polisi berseragamitulah yang bersentuhan dengan masyarakat baik tingkat Pospol maupun Polres," kata Babinkam Polri.

Pembenahan di bidang SDM sangat relevan dititik beratkan pada pembentukan kekuatan di lapangan secara profesional, yang mampu menguasai bidangnya. Samapta harus mempunyai satu postur yang kuat dengan kompetensi personel yang profesional bermoral serta terorganisir.

Variabel ketiga, memberikan pelayanan prima antara lain melalui peningkatan penggelaran polisi berseragam di lapangan dengan sikap responsif dan tidak diskriminatif dalam merespon pengaduan masyarakat.

PERATURAN KAPOLRI

Pada bagian arahnya Kababinkam mengingatkan soal Peraturan Kapolri No. 17 tahun 2009 tentang manajemen penanggulangan bencana. Peraturan itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan pertolongan dan penyelamatan korban akibat bencana dengan standar sistem manajemen keadaan darurat (SSMKD) di lingkungan Polri yang merupakan action plan yang merupakan kerja sama Polri dan pihak Amerika Serikat.

Sejauh ini diakui, penyelamatan korban bencana belum optimal antara lain disebabkan belum efektifnya pelaksanaan penanggulangan. Selain itu belum semua daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga menyulitkan koordinasi.

Iman haryatna juga menyinggung soal peran satwa Polri yang didukung keahlian pawang serta kemampuan khusus yang dimiliki satwa anjing dan kuda pendukung operasional. Selama ini fungsi tersebut sudah dirasakan terlihat dari kemampuan anjing pelacak untuk mengungkap

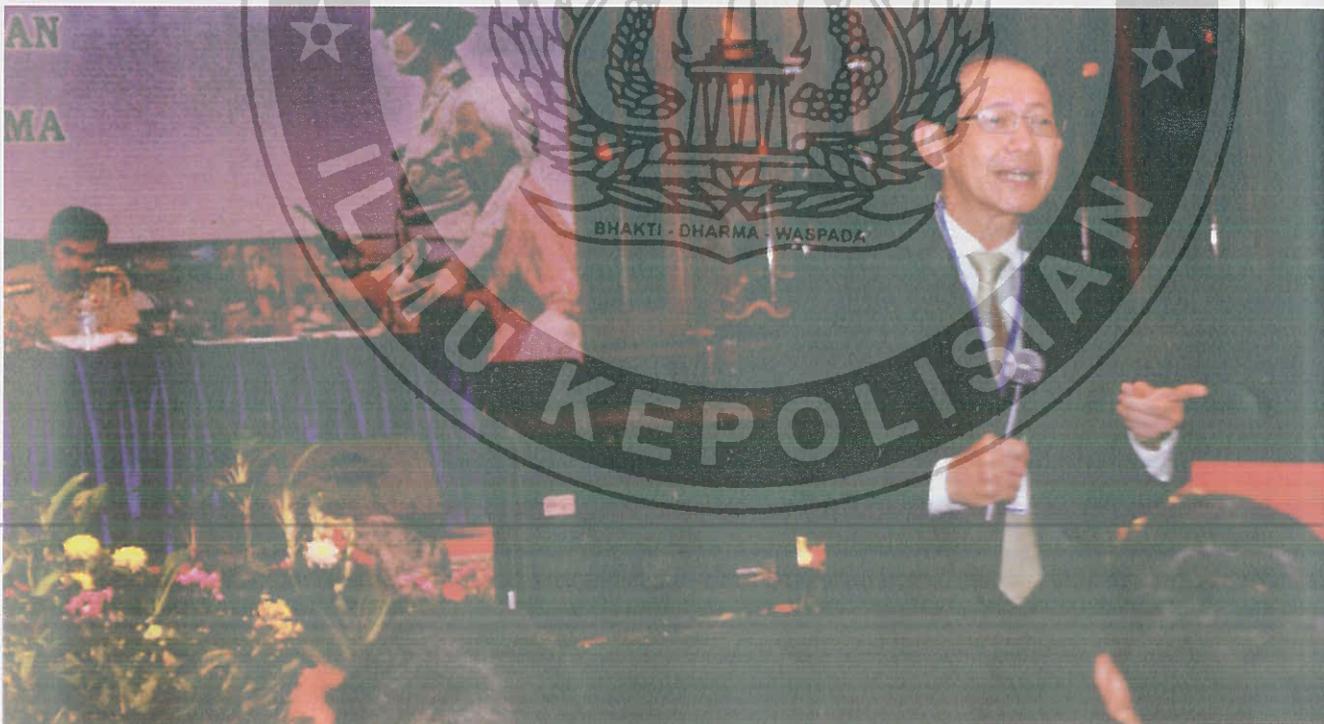
kasus tindak pidana maupun yang bersifat konvensional, transnasional maupun kejahatan kekayaan negara, yang berimplikasi kontinjensi melalui pelacakan kriminal mendeteksi bahan peledak, narkoba dan bantuan SAR.

Sedangkan kuda digunakan kegiatan patroli protokoler, Dalmas, SAR termasuk mendukung kegiatan Polmas.

Disamping itu, ada kegiatan operasional pada even nasional dan internasional seperti kedatangan tamu negara

Menurut Iman Haryatna, dari analisa tim Anev quick wins respon patroli Samapta terhadap aktualisasi penggelaran quick respon dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Ini sangat menggembirakan," ujar Iman Haryatna.

(jt)



Penyampaian Materi Strategi Marketing Kinerja Polantas
oleh Prof Hermawan Kartajaya

RAKERNIS POLAIR

'GOAL' BESAR BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT

RAKERNIS Fungsi Polair (polisi perairan) tahun 2010 yang berlangsung 4-5 Mei 2010 menghasilkan cukup banyak masukan. Bukan cuma buat Polri, tapi tentu saja goal besar bagi kepentingan masyarakat.

Mengambil berbagai topik menarik, Rakernis yang merupakan bagian dari pelaksanaan Quick Wins yang dicanangkan Polri itu berlangsung dinamis. Rakernis bertujuan menyamakan satu persepsi dalam pelaksanaan tugas fungsi teknis lalu lintas dalam mengimplementasikan program-program Quick Wins, di samping untuk menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2010.

Sementara sasaran yang akan diraih Rakernis tersebut adalah selain untuk menyamakan persepsi juga terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polair dan jajarannya tahun 2010.

DISADARI atau tidak, Polair sudah seharusnya mengambil peran lebih besar dalam tugas dan kewenangannya.

Bayangkan, seperti diungkapkan Dir Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil, Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc, Indonesia memiliki 17.480 pulau dan 92 pulau kecil yang di antaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Adalah Pulau-Pulau Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.





“Nah, PPKT memiliki nilai strategis mengingat statusnya sebagai Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, menentukan ZEE, dan sebagai landas kontinen Indonesia. Faktanya, PPKT adalah bagian integral dari pembangunan nasional, berjumlah 92 pulau tersebar di 20 provinsi dan berbatasan dengan 10 negara, 32% berpenduduk dan memiliki kandungan sumber daya alam khususnya ekosistem pesisir dan laut beserta biota yg hidup di dalamnya,” ungkap Toni Ruchimat dalam makalahnya mengenai “Kebijakan dan Strategi dalam “Pengelolaan Pulau-pulau terluar Indonesia.

Indonesia sangat luar biasa berdasarkan survey jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.480 pulau dan sebagian 92 pulau telah hilang karena pemanasan global, dll. Pulau kecil terluar adalah pulau yang memiliki dasar geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dari 92 pulau kecil terluar sebanyak 68% yang berpenduduk dan yang lainnya hanya

sebagai tempat singgah. Beberapa aspek pulau terkecil terluar dan yang perlu disikapi oleh Kepolisian karena pulau-pulau ini sebagai tempat transit, smuggling / penyelundupan dan pidana lainnya. Bagaimana melakukan pengamanan pulau2 terluar merupakan tugas dari Kepolisian Perairan karena rawan dipergunakan untuk melakukan tindakan pidana. Kerugian yang ditimbulkan dari pencurian ikan saat ini sangat luar biasa.

Di bagian lain, Marhaban Ibrahim juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia. Persoalan utamanya, kata Marhaban, adalah kejelasan batas wilayah negara yang sewaktu-waktu bisa terancam. Ia mencontohkan Blok Ambalat yang dibayangkan-bayangi imbas P. Sipadan dan Ligitan. Selain itu, saat ini setidaknya ada 12 PPKT yang sangat rawan transnational crime (illegal fishing, smuggling, human trafficking, illegal crossing dan terrorism) dan celaknya medan PPKT tersebut sangat sulit dan

terisolir (The 4 Ls, the Little, the Least, the last and the Lost). Kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat Belum ada sebuah kebijakan yang utuh dan integral dalam pengelolaan P2KT dan perairan sekitarnya.

“Telah sangat lama kawasan perbatasan terabaikan dan terbiarkan tidak terurus dengan baik dan benar. Menurut data Bappenas, selama ini kawasan perbatasan antarnegara diurus 75 instansi pemerintah tingkat unit eselon 1. Tapi, kondisinya masih sangat memprihatinkan dan merisaukan. Banyak soal belum terjawab dengan tepat,” ungkapnya.

Namun di sisi lain, lanjut Marhaban, PPKT juga menyimpan potensi/peluang, seperti SDA yg melimpah dan Jasa lingkungan yang sangat Potensial. Lebih dari itu, P2KT dalam kerangka Batas Antar Negara (92 pulau kecil terluar) juga sebagai garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic base line*) dalam pengukuran wilayah perairan spt : Laut Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen; Sebagai *gate keeper* ataupun gerbang terdepan (Security + Kedaulatan); Dari



halaman belakang ke halaman depan yang terurus dan produktif (baik di dalam kepulauan maupun perairan di sekitarnya; dan Telah menjadi amanat GBHN 1999-2004 yang kemudian dikuatkan dan dijabarkan dengan UU No. 25 Thn 2000 Ttg Propernas. "Dengan pendekatan SECURITY (Batas Wilayah Negara, kemandirian dan Stabilitas), PROSPERITY (Sosekbud, Infrastruktur dan IPTEK) TERINTEGRASI (KISS), perlu suatu kebijakan nasional yang *discriminating but constructive*. Artinya, sebuah kebijakan yang memiliki keberpihakan yang jelas dan besar, namun konstruktif dalam kerangka Good and Clean Governance," tandas Marhaban.

Sementara Prof. Dr. Max Rompas lebih menyoroti Kebijakan Kelautan Indonesia Terhadap Perlindungan Masyarakat Pesisir dan Ekosistemnya. Dalam rangka implementasi hukum laut internasional 1982, paparnya, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan pemanfaatan, pelestarian perlindungan laut dan pengelolaan wilayah laut nasional secara efektif

dan efisien. "Karena itulah dibentuk Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) yang bertugas mengkaji dan memberi pertimbangan serta rekomendasi kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden; termasuk juga berkonsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduan kebijakan dan penyelesaian masalah," ungkapnya.

Dalam konteks ini, lanjut Rompas, strategi pembangunannya meliputi percepatan peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Kelautan, meningkatkan Pengembangan Budaya Kelautan Secara Tepat Sasaran, mendorong Penegakan Kedaulatan Wilayah dan Hukum Secara Terpadu, inovasi dan Integrasi Kebijakan Ekonomi Kelautan Secara Nasional dan memperkuat Peran DEKIN dalam Mensinergikan Kebijakan Pengelolaan Kelautan Yang Berkelanjutan. "Tentu, hal sangat penting lainnya adalah mendorong penegakan kedaulatan wilayah dan hukum secara terpadu. Intinya, wilayah Kelautan Indonesia memiliki Batas Wi-

layah yang Pasti, Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keamanan di Laut dapat dilakukan oleh satu Institusi, multi Fungsi di bawah satu Komando. Juga Pembangunan Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-pulau Terdepan Mendapat Prioritas, selain Pertahanan di Laut yang Ditingkatkan."

Di luar itu, masih kata Rompas, kebijakan Kelautan terkait dengan perlindungan masyarakat. Dan ini berarti laut bebas dari ancaman kekerasan, Laut bebas dari ancaman terhadap kegiatan navigasi, dan laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum. Prof. Max Rompas mencontohkan beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain melakukan kerjasama dengan Singapura dalam hal ini dilakukan oleh Deplu. Berkaitan dengan pemantauan dengan kebijakan antara lain yang bermasalah dengan pengeboran minyak-minyak yang sudah tidak dipakai, rambu-rambu lalu lintas laut yang sudah rusak. "Kini juga sedang disusun aturan main dengan instalasi kabel bawah laut dekat dengan Singapura dan aturan mainnya belum ada sehingga diharapkan ada



kebijakan. Di dalam ada tenaga ahli yang menyangkut dengan sumber daya mineral, pariwisata dll yang memimpin pokja dan terdiri dari berbagai instansi yang selanjutnya hasil rapat dibawa ke Dewan Kelautan antara lain para menteri dan dipimpin oleh Presiden."

Mengenai penegakan hukum, keselamatan dan keamanan di laut, lanjut Rompass, diharapkan di antara pulau-pulau kecil dapat didirikan pos polisi karena di pula tersebut rawan terjadi tindak pidana dan untuk personil diberikan sarana dan pra sarana yg memadai untuk operasional personil dan ada insentif tersendiri. "Laut harus bebas dari ancaman kekerasan, navigasi dan pelanggaran hukum, hal tersebut merupakan tugas dari kepolisian khususnya Polair. Masalah criminal di laut sangat dikhawatirkan dan hal tersebut adalah tugas dari kepolisian."

Seperti Rompass, Direktur Perjanjian Politik Keamanan & Kewilayahan Arif Havas Oegroseno juga mengatakan, Meskipun Hukum kelautan tidak mengenal negara kepulauan akan tetapi Indonesia menggunakan

perundingan/perjanjian konsep negara kepulauan, setelah 10 tahun perjuangan dan mendapatkan bahwa semua dunia mengakui Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dunia. Wilayah Indonesia ditambah ZEE menjadi ±6 juta km², yang dibagi menjadi beberapa zona. "Nah, ZONA MARITIM DAN HAK-HAK NEGARA SESUAI UNCLOS 1982. Kita sudah ada UU yang lama yakni UU 1973 akan tetapi tidak berlaku karena sudah ada UNCLOS. Mengenai UU Kelautan kita sebenarnya sudah mengakui kalau di UU kelautan tersebut tidak membahas tentang negara kepulauan akan tetapi para pejuang kita berupaya untuk melakukan perundingan/perjanjian konsep negara kepulauan, setelah 10 tahun perjuangan dan mendapatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai wilayah dari sabang sampai marauke, membahas dari mulai titik pangkal garis dasar, masalah ikan dll. Itu adalah konstitusi dunia, jadi kalau kita membuat UU kelautan yang baru terus bagaimana dengan UNCLOS, yang harus dibuat adalah elemen-ele-

menya saja, mana aspek hukum laut yang tidak diatur. Di luar hak negara diatur oleh otoriter dasar laut dunia. Mengatur eksploitasi negara tersebut, yang belum ada di Indonesia adalah kebijakan kelautan Indonesia/koordinasi yang jelas," paparnya.

Laksamana TNI SUSANTO (Kapus Koor Kamla) juga menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang diapit oleh dua benua, Asia - Australia dan dua lautan India - Pasifik Sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia telah meratifikasi bersama 117 negara lainnya, dengan UU No. 17 Tahun 1985 dan Konvensi ini berlaku sejak 16 Nopember 1994. Konsekwensi bagi NKRI adalah berkeajiban untuk menentukan dan menjamin keamanan dan keselamatan bagi pengguna laut melalui wilayah NKRI (SLOC dan SLOT) yakni 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Semua itu adalah berkat usaha dari perjuangan para pahlawan meskipun hanya melewati diplomatik.

Ia menggambarkan beberapa fakta



terkait. Di antaranya, ratifikasi UNCLOS 82 dengan UU No. 17 th 1985, wilayah RI tambah luas dan ini membawa konsekwensi regulasi dan aparat. Belum tuntasnya permasalahan batas wilayah laut (sosial & eko, bud) dengan negara tetangga, kata Susanto, menimbulkan kerawan TP & TK- konflik kepentingan. Dan ini merupakan tantangan buat pemerintah & masyarakat dalam hubungan global- regional- internasional- rezim laut- Poleksosbudhankam & Iptek & infor- hukum. "tumpang tindihnya regulasi & instansi gakkum di laut sehingga timbul kerancuan & tidak pastian hukum—kerugian besar ----sektoral. Kita ini masih berorientasi land base oriented, sehingga menyebabkan tertinggal perkembangan bidang maritim. Paradigma ini perlu diubah menuju sea base oriented. Saat ini masih multi agency, single task—sektoral, tidak efektif & efisien/optimal butuhkan : single agency multi task. Masyarakat Internasional bingung mau melapor kemana, karena yang dianggap oleh masyarakat dunia adalah COSGAD," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama Susanto juga menjelaskan panjang lebar mengenai BAKORKAMLA. Menurutnya, BAKORKAMLA dibentuk tahun 1972 dengan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri dan Kejaksaan Agung RI dan amanat Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan. "Dalam rangka peningkatan fungsi, pada tanggal 29 Desember 2005 dideklasikan sebagai "the New" BAKORKAMLA, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005. " Kehadiran BAKORKAMLA, lanjut Susanto, merupakan jawaban atas Amanat UNCLOS 1982 yang diratifikasi UU. RI Nomor 17 Tahun 1985. Selain itu juga Dasar Hukum Internasional Terhadap Keselamatan Jiwa di Laut/International Convention about Life Safety in Sea (SOLAS 1974) dan Ketentuan Internasional terhadap Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan/International Convention about Ship Safety and Port Facilities (ISPS code 2002).

"Karena itu, salah satu tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

operasi keamanan laut secara terpadu, termasuk melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan indonesia, dan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu," paparnya.

Ia mencontohkan kegiatan Bakorkamla berupa operasi terkoordinasi sebagai pelaksana tugas peraturan presiden no. 81 tahun 2005, bakorkamla telah melaksanakan kegiatan patroli keamanan laut dengan sandi " gurita ", yang dilaksanakan secara terpadu dan bersama stakeholder bakorkamla. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya efektifitas dan efisiensi serta solusi " filling the gap" dari operasi rutin yang dilaksanakan oleh stakeholder.

Lainnya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir atau bindesir. Antara



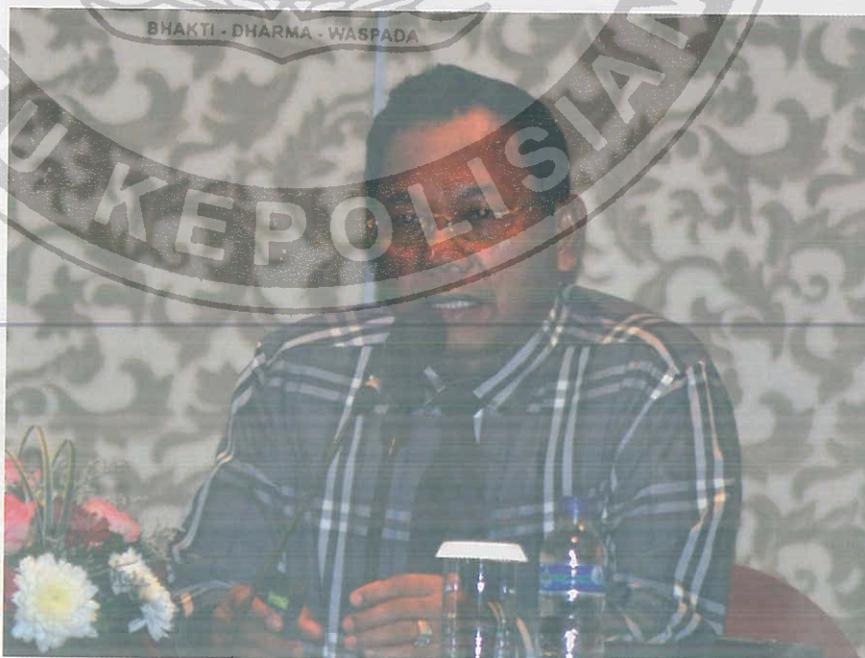
lain dalam bentuk pelatihan dan bhakti sosial di daerah pesisir di Indonesia dengan bekerja sama dengan anggota Bakorkamla (DKP, TNI, AL, Depdagri, dll), perguruan tinggi dan LSM. "Selain itu Bakorkamla juga memberikan masukan terhadap beberapa kajian yang menonjol di perairan Indonesia, berupa kajian telaah keamanan laut, kajian ini diserahkan kepada departemen atau instansi yang berwenang. Juga forum koordinasi dan konsultasi (forkor) yang merekomendasikan hal-hal yang sebaiknya ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebagai solusi bersama demi terciptanya pemerintahan di laut yang kuat dan berwibawa."

Tentu saja, lanjut Susanto, Bakorkamla melaksanakan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri misalnya, berupa kerjasama antara Bakorkamla dengan pemerintah daerah (Pemda), di antaranya peningkatan kegiatan forkor keamanan laut di Bangka-Belitung dan Sulawesui Utara, dengan terpasangnya peralatan GMDSS sebagai cikal bakal RCC (*rescue coordination center*) dan MRCC (*maritime rescue*

coordination center). Sedangkan di luar negeri, kerjasama dijalin di antaranya dengan China untuk pengembangan satelit kamla, lalu dengan Australia atau BPC berupa MoU sebagai tindak lanjut "Treaty Lombok" dan beberapa komitmen bantuan atau hibah dari Je-

pang, Amerika Serikat dan China.

Topik menarik lain yang dibahas dalam Rakernis Polair ini adalah mengenai Instrumen Hukum Utama bagi Perlindungan Pengungsi, termasuk di antaranya upaya pemberantasan penyelundupan manusia.



HASIL DAN KESIMPULAN

QUICK WINS POLMAS PERAIRAN

Paparan quick wins implementasi strategi kepolisian masyarakat (Polmas) terhadap masyarakat/komunitas perairan, muncul berbagai masukan dan tanggapan. Di antaranya menyebutkan, Polair tidak hanya sebagai penegak hukum akan tetapi bisa berfungsi sebagai peran Polmas. Karena itu, maksud pembuatan Polmas Polair adalah memberikan gambaran dan penjelasan penerapan polmas

bagi anggota polair, dengan Tujuan memberikan pedoman bagi anggota polair dalam pelaksanaan tugas polmas. Selain itu, disepakati bahwa Kebijakan Polmas untuk mengubah kinerja polair dlm penanganan masalah kamtibmas; penataan dan pembenahan pola kegiatan polair.

Penerapan polmas dalam setiap pelaksanaan tugas polair utama yang mengawaki kapal Polair sebagai

linyomas di wilayah pesisir dan pulau-pulau; mengetahui keinginan dan harapan masyarakat; mampu mengadaptasi aspirasi masyarakat; dan terbentuknya FKPM.

Peran Polmas justru ditekankan pada orang, bukan benda. Orang yang dimaksud adalah masyarakat perairan, nelayan, nahkoda dan lain). Setelah itu baru pada benda, kegiatan dan wilayah.

QUICK WINS SAMBANG NUSA

Dalam paparan mengenai Sambang Nusa (Pelaksanaan Patroli di Pulau Terluar/Terpencil yang berpenghuni), muncul beberapa masukan/tanggapan. Di antaranya bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan menciptakan rasa aman. Dan itu dilakukan berdasarkan asas Legalitas,

Asas Kepentingan Umum; Asas Selektifitas & Prioritas; dan Asas Kebersamaan .

Dalam pelaksanaannya, semua dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

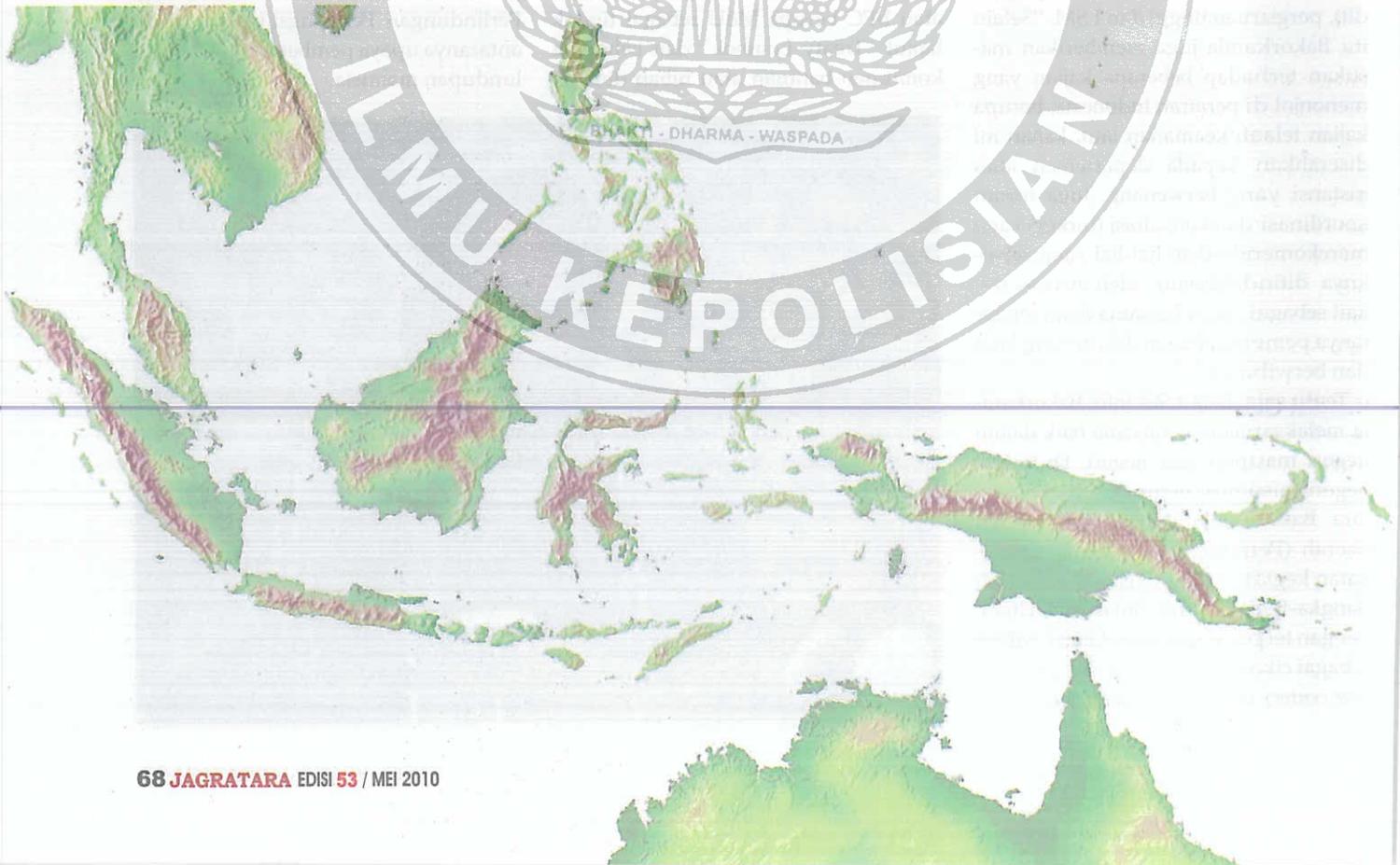
1. Utamakan Pencegahan. Tetap di

utamakan dg tetap waspadai dan siapkan upaya penindakan.

2. Profesional & Proporsional .

Pahami tugas dan sesuai fungsi dan kewenangannya.

3. Prinsip Keterpaduan. Tugas ops pam, di dasarkan pertimbangan, pam melibatkan berbagai pihak. ****



PULAU SENTUT



Kondisi Umum

Pulau Sentut termasuk salah satu pulau terluar yang terletak di gugus Kepulauan Mapur Propinsi Kepri. Pulau ini berbentuk bukit dengan pantai yang berbatu tajam.

Administratif

Secara administrasi, Pulau Sentut termasuk dalam wilayah Desa Mapur, kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berbatasan langsung dengan batas Negara Malaysia.

Kondisi Geografis

Secara geografis, Pulau Sentut terletak pada titik koordinat $01^{\circ} 02' 52''$ LU dan $104^{\circ} 49' 50''$ BT. Di Pulau ini tidak terdapat menara suar (mercusuar) dan hanya ditemukan batu sebagai tanda Titik Dasar No. TD 001 A dan Titik Referensi No. TR 001A.

Aksesibilitas

Untuk menjangkau Pulau Sentut tidak

ada transportasi yang khusus menuju ke sana. Pulau ini dapat ditempuh dengan menyewa kapal nelayan. Waktu tempuh untuk mencapai pulau Sentut dari Pelabuhan Kawal di Tanjung Pinang (Pulau Bintang) adalah 2 jam.

Topografi

Pulau ini berbentuk bukit dengan ketinggian di tengah pulau sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Jenis pantai di Pulau Sentut adalah pantai bertebing curam dan berbatu, dengan jenis batu yang berwarna hitam dan tajam.

Kedalaman perairan di tipe pantai yang berbatu adalah 0-6 meter di sekitar pulau dan untuk jarak yang lebih jauh dari pulau kedalamannya dapat mencapai 8 meter.

Oseanografi

Kondisi perairan di sekitar Pulau Sentut jernih dengan substrat dasar

berupa bebatuan. Arus di sekitar pulau ini tidak terlalu deras, yaitu sekitar 0,6 meter / detik untuk arus permukaan. Nilai rata-rata untuk kondisi perairan di Pulau Sentut masing-masing parameternya adalah suhu $29,7^{\circ}$ C, pH 7,7, salinitas 34 ‰, DO 6,6 mg/l, BOD 1,80 mg/l, ammonia 0,320 mg/l, nitrat 0,518 mg/l, nitrit $< 0,001$ mg/l dan sulfide $< 0,01$ mg/l.

Potensi Sumberdaya Alam

Vegetasi Pantai

Jenis vegetasi yang tumbuh di Pulau Sentut yaitu pohon ketapang serta beberapa jenis pohon tanaman keras dengan kerapatan 5 individu/50m² dan semak belukar yang padat.

Perikanan

Perairan Pulau Sentut dijadikan tempat menangkap ikan oleh nelayan sekitar. Ikan yang tertangkap oleh mereka antara lain jenis ikan karang. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan pada umumnya adalah bubu dasar.



PULAU TOKONGMALANGBIRU

Kondisi Umum

Pulau Tokongmalangbiru terletak di perairan Laut Natuna, tepatnya di gugusan Kepulauan Anabas dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Pulau ini berbentuk bongkahan batu besar yang di atasnya terdapat sebuah mercusuar. Di tengah batu ini terdapat sebuah prasasti yang menandakan pulau ini termasuk pulau terluar Indonesia.

Administratif

Secara administrasi, Pulau Tokongmalangbiru termasuk dalam wilayah Desa Kiabu, kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini tidak berpenghuni karena memang tidak layak untuk ditempati.

Kondisi Geografis

Secara Geografis, Pulau Tokongmalangbatu terletak pada titik koordinat $02^{\circ} 18' 00''$ LU dan $105^{\circ} 35' 47''$ BT. Di pulau ini terdapat titik Dasar No. TD 022 dan Titik Referensi No. TR 022.

Aksesibilitas

Pulau Tokongmalangbiru dapat diakses melalui perjalanan dari Batam menuju Palmatak (ibukota Pulau Matak) dengan menyewa kapal motor

berukuran sedang menuju Pulau Tokongmalangbiru yang memakan waktu tempuh 7 Jam.

Topografi

Pulau tokongmalangbiru berbentuk seperti dua buah bukit batu yang curam dan ditumbuhi tanaman perintis. Tepian pulau ini cukup curam sampai ke dasar laut yang dalam. Pantainya bertebing curam sehingga pada tepian pulau kedalaman pantai cukup dalam yaitu mencapai 5 meter dan sedikit ke arah luar pulau kedalaman perairannya mencapai 20 meter.

Oseanografi

Untuk kondisi perairan di Pulau Tokongmalangbiru nilai rata-rata masing-masing parameter adalah suhu $29^{\circ}C$, pH 7-8 salinitas 32 ‰, DO 7,6 mg/l, BOD 3,2 mg/l, amonia 0,017 mg/l, nitrat 0,05 mg/l, nitrit 0,017 mg/l dan sulfide $< 0,01$ mg/l.

Kondisi lingkungan di Pulau Tokongmalangbiru masih cukup baik karena belum banyak terdapat campur tangan manusia yang memanfaatkan pulau tersebut.

Potensi Sumberdaya Alam

Terumbu Karang

Pulau Tokongmalangbiru mempunyai

kedalaman perairan sekitar 6-7 meter dengan kondisi perairan yang jernih dengan dasar perairan yang berbatu (reeflat). Kondisi terumbu karang di Pulau Tokongmalangbiru masih bagus dengan persentase penutupan karang sekitar 70 %. Jenis-jenis karang yang ditemukan diperairan pulau ini yaitu dari genus Acrophora, Pocillophora, Leptoria, Favites, Favia, Porites, Millephora (karang api), Montiphora, Platygyra, Goniastres dan Hydnothophora, dengan jenis karang yang paling dominan adalah dari genus Porites dan Montiphora. Sedangkan Life form karang yang dominan adalah coral massive.

Perikanan

Perairan di sekitar [pulau Tokongmalangbiru kaya akan sumberdaya ikan. Jenis-jenis ikan yang ditemukan di perairan ini antara lain *Acanthurus lineatus*, *pamacanthus* sp, *Gymnothorax javanicus*, *Caesio teres*, *Caesio cuning*, *Ctenocheilus striatus* dan *Amphiprion* sp.

Banyak kapal nelayan baik nelayan local maupun nelayan Thailand dan Malaysia yang melakukan praktek illegal fishing di sekitar perairan pulau ini pada saat musim tidak berombak. Jenis ikan yang tertangkap oleh nelayan tersebut adalah ikan-ikan karang.

PULAU DAMAR



Kondisi Umum

Pulau Damar merupakan salah satu pulau terluar yang terletak digugusan Kepulauan Anambas. Pulau ini berupa batuan besar yang kokoh dan bertebing curam. Perairan di sekitar pulau ini bergelombang besar apabila terjadi Musim Utara. Masyarakat sekitar menyebut Pulau Damar dengan sebutan Tangkongatap karena bentuknya yang mirip tudung atap.

Administratif

Secara administrasi, Pulau Damar masuk ke dalam wilayah desa Mampok, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Damar terletak di Laut Natuna dan berbatasan dengan Negara Malaysia.

Kondisi Geografis

Secara geografis pulau ini terletak pada titik koordinat $02^{\circ} 44' 29''$ LU dan $105^{\circ} 22' 46$ BT. Di pulau ini terletak Titik Dasar pengukuran wilayah laut Indonesia yaitu No. TD 023 dan Titik Referensi No. TR 023.

Aksesibilitas

Untuk mencapai pulau Damar, perjalanan dapat diawali dari Batam menuju Palmatak yang merupakan ibukota Pulau matak dengan menggunakan pesawat perintis, dilanjutkan dengan menyewa

speedboat menuju Letung yang merupakan ibukota Pulau Jemaja. Dari Letung perjalanan dilanjutkan dengan menyewa kapal motor berukuran sedang menuju Pulau Damar dengan waktu tempuh selama 4 jam.

Topografi

Pulau ini berbentuk batu besar yang menyerupai atap dengan tebing curam. Kondisi ini membuat perairan sekitar pulau yang memiliki kedalaman 6 meter dan untuk daerah yang lebih jauh dari pulau memiliki kedalaman sampai lebih dari 15 meter. Tipe pantainya bertebing curam dengan dasar perairan berupa batu karang.

Oseanografi

Perairan pulau ini memiliki gelombang yang besar apabila memasuki musim Barat dan akan memasuki musim Laut tenang pada bulan April sampai Agustus. Kualitas air yang ada di Pulau Damar meliputi : suhu $29, 80^{\circ} C$; pH 8; salinitas 31-31,5 ‰; DO 6,6 mg/l; BOD 2,3 mg/l; ammonia 0,022 mg/l; nitrat 0,04 mg/l; nitrit 0,015 mg/l dan sulfida $< 0,001$ mg/l.

Potensi Sumberdaya Alam Terumbu Karang

Di Pulau Damar ini tidak dapat ditemukan terumbu karang karena perairan di sekitar pulau ini sangat dalam dengan ombak yang besar



sehingga sulit untuk dilakukan penyelaman

Perikanan

Ikan-ikan yang menjadi hasil tangkapan utama diperaian ini adalah ikan tongkol dan tenggiri. Pada bagian dalam pulau ini terdapat sumber air tawar yang besar seperti kolam dan menjadi tempat berkumpulnya burung camar hitam. Selain itu juga terdapat goa besar di bagian bawah pulau. Perairan sekitar Pulau Damar menjadi lokasi tempat tenggelamnya 4 buah kapal yang membawa barang-barang bernilai sejarah tinggi. Hal ini menyebabkan seringnya para nelayan Malaysia berada di perairan sekitar pulau ini.

Infrastruktur

Satu-satunya infrastruktur di pulau ini hanyalah mercusuar kecil di atas pulau sebagai alat bantu navigasi pelayaran.

Awas!

MEMODIFIKASI PLAT KENDARAAN KENA TILANG

SINYAL bagi pemilik mobil yang suka memodifikasi kendaraan. Mulai 1 April 2010 lalu, bagi yang memodifikasi plat kendaraan akan kena tilang. Dendanya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 500 ribu.

Hal itu dibenarkan AKBP Katon Pinem, kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu. "Jelas itu sebuah pelanggaran terhadap UU No.22 tahun 2009. Jadi, harus ditilang," tegas Katon Pinem.

Katon mengatakan, modifikasi nomor kendaraan dilarang karena membuat Kepolisian sulit

mengidentifikasi nomor tersebut. Selain itu, akan merugikan para pengguna kendaraan karena nomor kendaraan tidak jelas.

"Misalnya, kalau menjadi korban tabrak lari nopolnya tidak jelas sehingga tidak teridentifikasi atau misalnya, pemilik kendaraan menjadi korban pencurian kendaraannya. Karena nomornya tidak jelas sehingga tidak teridentifikasi melalui pantauan CCTV," kata Katon.

Katon mengimbau masyarakat agar menggunakan nomor yang dikeluarkan secara resmi oleh Kepolisian. Menurut dia, nomor yang

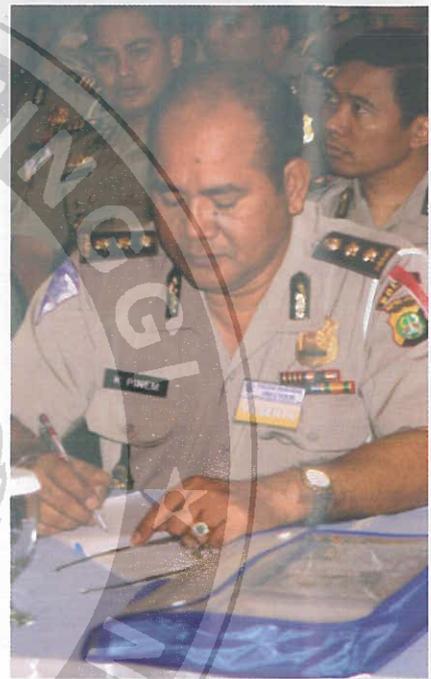


FOTO: HUMAS PMU



FOTO: IST

dikeluarkan oleh pihak Kepolisian sudah disesuaikan spesifikasinya dan ada logo hologram lalu lintas yang berada di pojok kiri bawah.

"Khusus untuk mobil, diimbau agar lampu nomor kendaraan yang ada di atas nopol tetap menyala," ujar dia.

Menurutnya, kepolisian sudah sejak lama mensosialisasikan aturan itu.

"Penindakannya, kita kan sekarang sedang melakukan operasi Simpatik Jaya. Dalam operasi simpatik ini, selain menindak pelanggar lalu lintas misalnya, pengguna motor yang tidak menggunakan helm SNI, kita juga mengimbau dan memberikan teguran kepada masyarakat untuk tetap menggunakan plat nomor asli," kata Katon Pinem. [JT 02]

VISI DAN MISI POLANTAS

VISI:

Terwujudnya pelayanan Kamseltibcarlantas prima, keasadaran dan kepatuhan berlalu lintas, serta terjalannya sinergi polisional yang pro-aktif.

MISI:

1. Memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Mengembangkan perpolisidian masyarakat berbasis pada masyarakat yang patuh dan sadar hukum.
5. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan lalu lintas guna meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polantas guna mendukung tugas Polri.
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan.
9. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas.

Innâ lîl-lâh-i Wa innâ ilay-hi Râji'un



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Polri Pengedegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya

WAKA BENG PUS ANG

LETKOL CBA TRI TULUS SULASDIANTO

Pada Hari Kamis, 07 Mei 2010

*Semoga, Allah SWT Mengampuni semua dosa Almarhum
dan memberikan tempat Yang terbaik di sisi-Nya,
dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan Kekuatan dan Ketabahan*

Amin